



dpmptsp
LUWU TIMUR

melayani anda, membangun bersama

LAPORAN KINERJA TAHUN 2023

**DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

**KABUPATEN
LUWU TIMUR
2023**

KATA PENGANTAR

Laporan kinerja Dinas penanaman modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Luwu Timur tahun 2023 ini disusun dengan tujuan memberikan informasi kinerja kepada Bupati Luwu Timur dan berbagai pihak yang berkepentingan atas kinerja yang telah dicapai dan sebagai bagian dari upaya perbaikan berkesinambungan bagi Dinas Penanaman Modal dan PTSP.

Laporan kinerja Dinas penanaman modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Luwu Timur Tahun 2023 ini cakup hasil-hasil yang telah dicapai, analisis pencapaian tujuan dan sasaran strategis, serta kemajuan pencapaian tujuan dan sasaran strategis dalam rangka mencapai target Rencana Strategis DPMPTSP Kab. Luwu Timur Tahun 2021 - 2026.

Kami melaporkan pengukuran kinerja Tahun 2023 dari 6 program yang dapat diukur kinerjanya. Hasil pengukuran kinerja tersebut menunjukkan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab Luwu Timur Telah mencapai 99,26 dengan **Predikat Baik**, dari target kinerja yang ditetapkan dalam dokumen Perjanjian kinerja Tahun 2023 sesuai dengan target dalam Rencana Strategis. Kedepan, Kami akan melakukan Berbagai perbaikan untuk dapat mencapai kinerja yang memuaskan.

Malili, 28 Februari 2024

KEPALA DPM-PTSP,



ANDI HABIL UNRU, SE

Pangkat : Pembina Utama Muda

NIP : 19641231 198703 1 208

DAFTAR ISI

Perihal	Halaman
Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Daftar Tabel	iii
Daftar Grafik	iv
BAB I PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang	1
1.2 Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi	2
1.3 Struktur Organisasi	2
1.4 Kondisi Pegawai	3
1.5 Sistematika Penyajian	3
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021	
2.1 Rencana Strategis	5
a. Tujuan dan sasaran	5
b. Indikator Kinerja Utama	8
2.2 Alokasi Anggaran	8
2.3 Perjanjian Kinerja Tahun 2021	11
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	
3.1 Capaian Kinerja Organisasi	13
3.2 Realisasi Anggaran	34
BAB IV PENUTUP	
LAMPIRAN	

DAFTAR ISI

hal.

KATA PENGANTAR	<i>i</i>
DAFTAR ISI	<i>iv</i>
DAFTAR TABEL	<i>v</i>
DAFTAR GAMBAR	<i>vii</i>
DAFTAR GRAFIK	<i>viii</i>

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Tugas dan Fungsi	1
1.2 Struktur Organisasi	1
1.3 Aspek Strategis Organisasi	4
1.4 Isu Strategis/Permasalahan	6
1.5 Sistematika Laporan	7

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

A. Target Kinerja tahun 2021-2026	9
1. Visi dan Misi 10	
2. Indikator Kinerja Sasaran	10
B. Perjanjian Kinerja Tahun 2023	13

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 Capaian Kinerja Organisasi	16
3.2 Analisis Capaian Kinerja	17

BAB IV PENUTUP

108

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam rangka pelaksanaan tata pemerintahan (good governance), diharapkan adanya transparansi dalam pengelolaan keuangan Negara. Berkaitan dengan hal tersebut diperlukan system pertanggungjawaban yang tepat, jelas dan teratur, sehingga penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih, bertanggung jawab (akuntabel) serta diharapkan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

Sejalan dengan hal tersebut, dan dalam rangka pelaksanaan Tap MPR RI Nomor IX/MPR/1998 dan Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme, maka diterbitkan instruksi priseden republic Indonesia (INPRES) Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Hal ini mewajibkan setiap instansi pemerintah sebagai penyelenggara Negara untuk mempertanggung jawabkan pelaksanaan tugas pokok dang fungsinya berdasarkan Rencana Strategis (RENSTRA) yang telah dirumuskan sebelumnya.

Laporan ini disusun dengan pedoman pada peraturan Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja , Pelaporan Kinerja, dan tata cara Reviu atas laporan kinerja instansi pemerintah.

Untuk mendukung pelaksanaan Penanaman Modal di Kabupaten Luwu Timur pemerintah Kabupaten luwu Timur telah menerbitkan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Luwu Timur, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam melaksanakan kebijakan teknis urusan pemerintahan di Bidang Penanaman Modal dan PTSP.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Luwu Timur dibentuk melalui Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Kabupaten Luwu Timur dan sebagaimana perubahan terakhir berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 67 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan

Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Luwu Timur. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Luwu Timur terletak dikompleks perkantoran Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Timur Jl. Soekarno Hatta, Puncak Indah Malili, Kabupaten Luwu Timur.

Selanjutnya dalam rangka mendukung kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Luwu Timur, perlu adanya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah yang merupakan perwujudan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada setiap Instansi Pemerintah, berdasarkan suatu sistem akuntabilitas yang memadai. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah juga berperan sebagai alat kendali, alat penilai kinerja dan alat pendorong terwujudnya good governance. Dalam perspektif yang lebih luas, maka Laporan Kinerja Instansi Pemerintah berfungsi sebagai media pertanggungjawaban kepada publik. Semua itu memerlukan dukungan dan peran aktif seluruh lembaga pemerintahan pusat dan daerah serta partisipasi masyarakat.

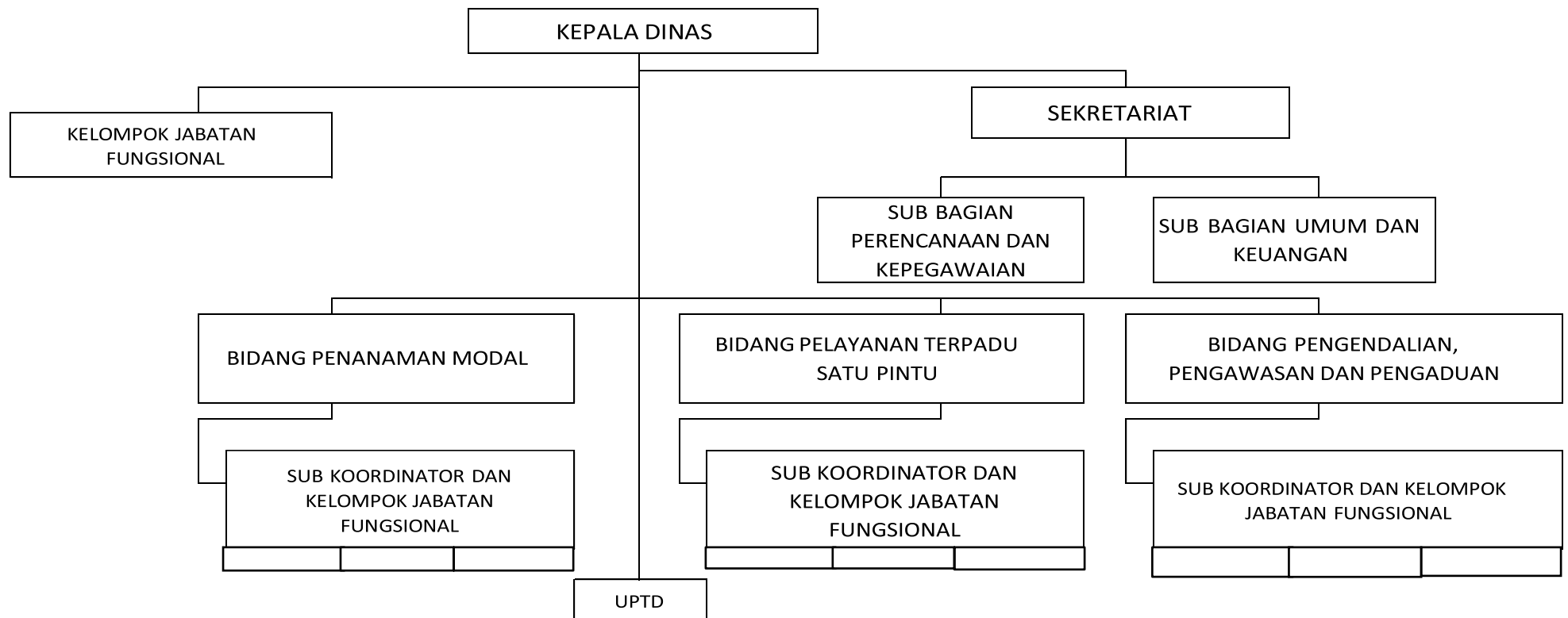
Dokumen Laporan Kinerja merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban Instansi Pemerintah dalam pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan yang dilaksanakan berdasarkan Renstra maupun Rencana Kinerja Tahunan yang dibuat sebelumnya, serta merupakan sarana untuk menilai dan mengevaluasi pencapaian kinerja berdasarkan indikator sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya.

Untuk menilai efektifitas pelaksanaan program dan kegiatan serta mengukur sejauh mana pencapaian sasaran berdasarkan indikator yang ada, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan terpadu Satu Pintu menyusun Laporan Kinerja Tahun 2023. Laporan Kinerja ini secara terstruktur akan menginformasikan capaian kinerja dari setiap pelaksanaan program dan kegiatan dalam kurun waktu 1 Tahun.

Maksud dan tujuan penyusunan Laporan Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan terpadu Satu Pintu Kabupaten Luwu Timur Tahun 2023 adalah untuk mengkomunikasikan pencapaian sasaran strategis Tahun 2023 kepada stakeholder guna mewujudkan akuntabilitas kepada pihak-pihak yang memberikan mandat atau amanah. Dengan demikian, Laporan Kinerja ini merupakan sarana untuk mengkomunikasikan dan menjawab tentang apa yang telah dicapai pada Tahun 2023 dan bagaimana proses pencapaiannya.

1.2 Struktur Organisasi

Dinas Penanaman Modal dan pelayanan terpadu Satu Pintu Kabupaten Luwu Timur melalui Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Luwu Timur dan sebagaimana perubahan terakhir berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 67 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.



1.3 Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Berdasarkan PERDA tersebut diatas, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Luwu Timur mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut:

Tugas : Membantu Bupati dalam memimpin dan melaksanakan urusan pemerintahan dibidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu yang menjadi kewenangan Daerah,

Fungsi :

- Perumusan pelaksanaan kebijakan teknis dibidang penanaman modal, dibidang pelayanan terpadu satu pintu, dibidang pengendalian, pengawasan dan Pengaduan, pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan kesekretariatan yang menunjang tugas organisasi.
- Pelaksanaan kegiatan administrasi Dinas dan pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait tugas dan fungsinya.

Dinas Penanaman Modal dan PTSP dipimpin oleh Kepala Dinas (Eselon II) dan terdiri atas:

- Sekretariat, terdiri atas :
 1. Subbagian Umum dan Keuangan;
 2. Subbagian Perencanaan dan Kepegawaian.
- Bidang Penanaman Modal
 1. Sub Koordinator dan Kelompok Jabatan Fungsional;
- Bidang Pelayanan Terpadu Satu Pintu
 1. Sub Koordinator dan Kelompok Jabatan Fungsional;
- Bidang Pengendalian, Pengawasan dan Pengaduan
 1. Sub Koordinator dan Kelompok Jabatan Fungsional;

1.4 Isu Strategis :

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Luwu Timur merupakan unsur pendukung dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah, berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 67 Tahun 2021 telah diatur tugas pokok dan fungsi dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Luwu Timur antara lain membantu Bupati dalam dibidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu yang menjadi kewenangan Daerah

serta berfungsi merumuskan kebijakan teknis dibidang penanaman modal, dibidang pelayanan terpadu satu pintu, dibidang pengendalian, pengawasan dan Pengaduan, pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan kesekretariatan yang menunjang tugas organisasi penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Dalam pelaksanaan tugasnya DPMPTSP Kabupaten Luwu Timur mendukung dan mewujudkan tercapainya 2 sasaran strategis Daerah Kabupaten Luwu Timur yaitu “Ketersediaan Lapangan Pekerjaan dan Lapangan Usaha (S5) serta Meningkatnya kualitas Pelayanan Publik (S9)”. Namun dalam pelaksanaan penanggulangan bencana di Kabupaten Luwu Timur masih terdapat permasalahan antara lain :

1. Belum Optimalnya Promosi Potensi Investasi Daerah;
2. Belum sempurnanya Regulasi daerah dalam perbaikan Iklim Investasi;
3. Belum tersedianya data dan informasi terkait potensi dan peluang investasi;
4. Belum maksimalnya pelaksanaan pengendalian, pemantauan dan pengawasan terhadap PMA/PMDN;
5. Belum maksimalnya pemanfaatan teknologi dalam pelayanan Informasi secara terpadu;

1.5 Keadaan Pegawai :

Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab Luwu Timur didukung oleh Sumber Daya Manusia sebanyak 40 (Empat Puluh) orang yaitu terdiri dari :

- Pegawai Negeri Sipil : 18 Orang
- Tenaga Upah Jasa : 21 Orang

Komposisi pegawai dan upah jasa menurut data terakhir pada tahun 2023 adalah sebagai berikut :

Tabel. 1
Jumlah Pegawai dan upahjasa Berdasarkan Tingkat Pendidikan Dinas Penanaman Modal
dan PTSP
Kabupaten Luwu Timur Tahun 2023

No.	Unit /Bidang	Tingkat Pendidikan					Jumlah
		SMP	SMA	D3	S1	S2	
1	Sekretariat	2	6	-	7	1	16
2	Bidang Penanaman Modal	-	1	-	2	2	5
3	Bidang Pelayanan Terpadu Satu Pintu	-	6	-	3	3	12
4	Bidang Pengendalian, Pengawasan dan Pengaduan	-	1	1	4	-	6
TOTAL		2	14	1	16	6	39

Tabel. 2
Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan Dinas Penanaman Modal dan PTSP
Kabupaten Luwu Timur Tahun 2023

No.	Sekretariat/Bidang	2				JUMLAH
		I	II	III	IV	
1	Sekretariat	-	1	3	2	6
2	Bidang Penanaman Modal	-	-	2	1	3
3	Bidang Pelayanan Terpadu Satu Pintu	-	1	4	-	5
4	Bidang Pengendalian, Pengawasan dan Pengaduan	-	-	3	1	4
TOTAL		0	2	12	4	18

Tabel 3
Klasifikasi Sumber Daya Manusia berdasarkan Eselonisasi

No	Jabatan	Jumlah
1	Eselon II	1
2	Eselon III	4
3	Eselon IV	2
4	Fungsional Tertentu (Ahli dan Trampil)	7
5	Fungsional Pelaksana (Staf)	4
	Jumlah	18

1.5 SISTEMATIKA PELAPORAN

Laporan Kinerja ini pada dasarnya adalah suatu media untuk mengkomunikasikan capaian kinerja DPMPSTSP Kabupaten Luwu Timur Tahun 2023. Capaian Kinerja tersebut dibandingkan dengan Rencana Kinerja Tahun 2023 yang telah diselaraskan dengan Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2023, yang merupakan tolok ukur keberhasilan organisasi.

Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja ini akan memungkinkan diidentifikasinya sejumlah celah kinerja bagi perbaikan di masa datang. Artinya, terhadap capaian yang telah mencapai atau melebihi target (sudah baik) agar tetap dipertahankan, sedangkan terhadap capaian kinerja yang masih di bawah target untuk masa mendatang dapat dilakukan perbaikan melalui strategi-strategi yang lebih baik.

Memperhatikan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, maka Laporan Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2023 ini disusun dengan sistematika penulisan dengan bagan sebagai berikut :

Bab 1 Pendahuluan

Bab ini berisi Penjelasan umum tentang latar belakang, struktur organisasi, fungsi dan tugas, cascading, isu strategis, keadaan pegawai, keuangan, ringkasan laporan hasil evaluasi dan sistematika penyusunan Laporan Kinerja.

Bab II Perencanaan Kinerja

Bab ini berisi Perencanaan Strategis (Visi Misi Kepala Daerah, Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah, Strategi, Program dan Kegiatan), Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2023, Rencana Anggaran Perubahan Tahun 2023 (Target Belanja Perangkat Daerah, Alokasi Anggaran Per Sasaran Strategis).

Bab III Akuntabilitas Kinerja Tahun 2023

Pada bagian ini disajikan uraian hasil pengukuran kinerja, evaluasi, dan analisis akuntabilitas kinerja. Termasuk didalamnya menguraikan secara sistematis perbandingan data kinerja secara memadai, keberhasilan/kegagalan, dan permasalahan yang dihadapi serta langkah-langkah antisipatif yang akan diambil. Disajikan pula akuntabilitas keuangan dengan cara menyajikan rencana dan realisasi anggaran bagi pelaksanaan tugas dan fungsi atau tugas-tugas lainnya dalam rangka mencapai sasaran organisasi yang telah ditetapkan, termasuk analisis tentang capaian indikator kinerja dan efisiensi.

Bab IV Penutup

Pada bagian ini dikemukakan simpulan secara umum tentang keberhasilan/ kegagalan, permasalahan dan kendala utama yang berkaitan dengan kinerja instansi yang bersangkutan serta rencana tindak lanjut.

LAMPIRAN

1.6 Isu-isu Strategis/Permasalahan

Berdasarkan evaluasi terhadap pelaksanaan program/kegiatan, teridentifikasi beberapa permasalahan atau kendala yang dihadapi antara lain :

1. Tuntutan pelayanan public yang transparan, cepat, objektif dan professional serta meningkatnya persaingan inovasi pelayanan .
2. Perlunya penyebarluasan informasi layanan, Inovasi, Peraturan baru dan Sistem Informasi Pelayanan.
3. Perlunya promosi keunggulan Kompetitif dan potensi peluang investasi guna menarik calon investor.
4. Peningkatan kerjasama antara pelaku usaha besar dengan UMKM sehingga dapat memperkuat keterkaitan diantara pelaku usaha.
5. Perlunya memelihara Pelaku Usaha yang sudah ada, mengetahui permasalahan pelaku usaha dan untuk mengetahui perkembangan usahanya.
6. Perlunya upaya jemput bola guna fasilitasi calon investor yang akan masuk maupun penyelesaian permasalahan usahanya.
7. Perlunya penyelesaian aduan secara cepat dan proporsional.
8. Perlunya Pelaku Usaha agar dapat memenuhi hak dan kewajiban serta mentaati peraturan terkait dengan kegiatan usahanya.

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

2.1 Rencana Strategis

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu menyusun Rencana Strategis Tahun 2021-2026 berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 dengan fokus pada program dan kegiatan yang menjadi kewenangannya. Dokumen Renstra DPMPTSP 2021-2026 mengacu kepada RPJMD 2021-2026 yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 11 Tahun 2021.

Visi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah :

“Kabupaten Luwu Timur Yang Berkelanjutan dan Lebih Maju Berlandaskan Nilai Agama dan Budaya”

Misi Ke-2 RPJMD :

“Mengembangkan perekonomian daerah yang berdaya saing dan berjangkauan luas”

Misi Ke-4 RPJMD :

“Menciptakan pemerintahan dan pelayanan publik yang lebih baik”

Sasaran Strategis

1. Meningkatnya Nilai Realisasi Investasi Daerah;
2. Meningkatnya Kualitas Pelayanan perizinan dan Non Perizinan
2. Meningkatnya kualitas dan pencapaian kinerja penyelenggaraan urusan perangkat daerah.

Tujuan adalah penjabaran dari misi yang merupakan hasil akhir yang harus dicapai dalam kurun waktu perencanaan sampai 5 (lima) tahun. Tujuan Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Luwu Timur tahun 2021 - 2026 adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan Jumlah Lapangan Kerja dan Lapangan Usaha
2. Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
3. Meningkatkan Akuntabilitas Penyelenggaraan Layanan Urusan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Sasaran merupakan hasil yang akan dicapai secara nyata, dapat terukur dalam kurun waktu tertentu/ tahunan, lebih pendek dari tujuan, dapat dicapai secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang telah ditetapkan. Sasaran Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Luwu Timur yang akan dicapai :

1. Meningkatnya Nilai Realisasi Investasi Daerah;
2. Meningkatnya Kualitas Pelayanan perizinan dan Non Perizinan
3. Meningkatnya Capaian Kinerja dan Keuangan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

TABEL 4.

TUJUAN, SASARAN DAN INDIKATOR KINERJA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
TAHUN 2021 – 2026

NO	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	KONDISI AWAL 2021	TARGET KINERJA PADA TAHUN KE-				
					2022	2023	2024	2025	2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.	Meningkatkan jumlah Lapangan Kerja dan Lapangan Usaha	Meningkatnya Nilai Realisasi Investasi Daerah	Nilai Realisasi Investasi (PMDN dan PMA)	3 T	3,3 T	3,5 T	3,8 T	3,9 T	4 T
2.	Meningkatkan Kualitas Pelayan Perizinan dan Non Perizinan	Meningkatnya Pelayanan perizinan dan Non Perizinan	Rata-rata lama penyelesaian perizinan usaha	70.00	72.00	75.00	77.00	80.00	82.00
3.	Meningkatkan Akuntabilitas penyelenggaraan layanan urusan perangkat daerah	Meningkatnya Kualitas dan Capaian Kinerja dan Keuangan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Persentase Capaian Kinerja Program Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	90.01	92.01	94.01	96.01	98.01	100.00

TABEL 5.

**INDIKATOR KINERJA UTAMA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
TAHUN 2021 – 2026**

NO	Indikator Kinerja	Satuan	KONDISI AWAL 2021	TARGET KINERJA PADA TAHUN KE-				
				2022	2023	2024	2025	2026
(1)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.	Nilai Realisasi Investasi (PMDN dan PMA)	Triliun	3 T	3,3 T	3,5 T	3,8 T	3,9 T	4 T
	Nilai Realisasi Investasi PMA	Triliun	2,3 T	2,5 T	2,65 T	2,9 T	2,95 T	3 T
	Nilai Realisasi Investasi PM	Milyar	700 M	800 M	850 M	900 M	950 M	1 T
2.	Rata-rata lama penyelesaian perizinan usaha	%	70.00	72.00	75.00	77.00	80.00	82.00

2.2 Alokasi Anggaran Per Program Tahun 2023

Untuk mewujudkan visi dan misi serta tujuan yang telah ditetapkan dalam Renstra, Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Luwu Timur melaksanakan 6 program, 13 Kegiatan dan 32 sub kegiatan dengan anggaran belanja Pegawai sebesar Rp. 2.461.491.163, Belanja Barang dan Jasa Rp. 2.162.096.962,- dan Belanja Modal Rp 133.000.000,-. Penetapan out put dan out come ada pada masing-masing kegiatan.

Adapun anggaran per program untuk masing-masing kegiatan dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 8.

Program dan Pagu Anggaran DPMPTSP Kab. Luwu Timur Tahun 2023

NO	PROGRAM	JUMLAH SUB KEGIATAN	ANGGARAN
1	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	26	3.586.287.495
2	Pengembangan Iklim Penanaman Modal	3	161.694.290
3	Promosi Penanaman Modal	2	180.998.490
4	Pelayanan Penanaman Modal	2	333.108.350
5	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	3	469.500.000
6	Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	1	24.999.500
Total			4.756.588.125

2.3 Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2023

Perjanjian kinerja merupakan kontrak kinerja yang harus diwujudkan oleh pemerintah daerah dengan tolak ukur keberhasilan kinerja pemerintah daerah yang memuat target indikator utama/ sasaran yang telah ditetapkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Kabupaten Luwu Timur pada Tahun 2023.

Penetapan kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang mempresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelola. Tujuan khusus penetapan kinerja antara lain Adalah:

1. Meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur
2. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi.
3. Menciptakan tolak ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur.

Tabel. 6
Perjanjian Kinerja Tahun 2023

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA TUJUAN DAN SASARAN	TARGET
1	Meningkatnya Nilai Realisasi Investasi Daerah (S1)	Nilai Realisasi Investasi Penanaman Modal Asing (PMA)	2.650.000 (Juta Rupiah)
		Nilai Investasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN)	850.000 (Juta Rupiah)
2	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan (S3)	Rata-rata Lama Penyelesaian Perizinan Usaha	75,00
3	Meningkatnya Capaian Kinerja dan Keuangan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (S2)	Prestasi Nilai AKIP	71,00

Penetapan sasaran strategis yang akan dicapai dan pengukuran tingkat keberhasilan dituangkan dalam dokumen rencana kinerja (*performance plan*) 2023. Setiap sasaran strategis memiliki indikator kinerja dengan target kinerja.

Tabel.7
Perjanjian Kinerja Tahun 2023

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1.	Meningkatnya Nilai Realisasi Investasi Daerah	Nilai Realisasi Investasi (PMDN dan PMA)	3.500.000.000.000.000
2.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan perizinan dan Non Perizinan	Rata-rata lama penyelesaian perizinan usaha	75,00
3.	Meningkatnya kualitas dan pencapaian kinerja penyelenggaraan urusan perangkat daerah	Persentase Capaian Kinerja Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	94%

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target
a.	Bidang Penanaman Modal		
I.	Meningkatnya Investor PMA/PMDN yang berskala Nasional	Jumlah Investor PMA dan PMDN yang berskala Nasional	40 Investor
II.	Meningkatnya Nilai realisasi Investasi Daerah	Jumlah Investasi PMA Jumlah Investasi PMDN	2,65 Triliun 850 Milyar
b.	Bidang Pelayanan Terpadu Satu Pintu		
1.	Terwujudnya Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Elektronik	Persentase Capaian Kinerja Pelayanan Perizinan dan Non perizinan secara terpadu	100%
2	Tersedianya data dan informasi Perizinan dan Non Perizinan	Database Penanaman Modal yang Valid	1 Dokumen
c.	Bidang Pengendalian, Pengawasan dan Pengaduan		
1.	Terlaksananya kegiatan Pengendalian Pelaksanaan penanaman modal	Persentase Pelaku usaha yang taat terhadap peraturan yang terkait Penanaman Modal	77 %
d.	Sekretariat		
1.	Terciptanya sistem pelayanan administrasi perkantoran yang memadai	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	94,01%
No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
a.	Bidang Penanaman Modal		
1.	Terwujudnya Pemberian Fasilitas/Insentif di bidang Penanaman Modal	Persentase PMA/PMDn yang terfasilitasi	100%
2.	Terwujudnya Peta Potensi	Persentase jenis potensi yang	100 %

	Investasi	disusun dalam peta potensi Kabupaten	
3.	Terwujudnya Promosi Penanaman Modal	Jumlah MoU Penanaman Modal yang dihasilkan	5 MoU
b.	Bidang Pelayanan Penanaman Modal		
1.	Terwujudnya Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Elektronik	Persentase Capaian Kinerja Pelayanan Perizinan dan Non perizinan secara terpadu	100%
2.	Terwujudnya Pengolahan serta penyajian data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan	Persentase Data dan informasi Penanaman Modal yang dikelola	100%
c.	Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal		
1.	Terwujudnya peningkatan nilai Realisasi Investasi	Persentase Pelaku Usaha yang Menyampaikan LKPM	90%
d.	Sekretariat		
1.	Tersedianya dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang tersusun tepat waktu	Persentase penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran & evaluasi tepat waktu	100%
2.	Tersedianya laporan keuangan perangkat daerah	Persentase administrasi keuangan yang terselenggara dengan baik	100%
3.	Terlaksananya administrasi dan penatausahaan Barang Milik Daerah pada perangkat daerah	Persentase BMD yang diadministrasikan sesuai standar	100%
4.	Terlaksananya realisasi Pendapatan Asli Daerah Perangkat Daerah	Persentase Realisasi pendapatan perangkat daerah	100%
5.	Tersedianya administrasi kepegawaian perangkat daerah	Persentase Rata-rata Capaian Kinerja Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100%
6.	Terlaksananya administrasi umum perangkat daerah	Persentase Rata- Rata Capaian Kinerja Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%
7.	Terpenuhinya kebutuhan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	Persentase BMD-Perangkat Daerah penunjang yang terpenuhi	100%
8.	Tersedianya jasa pendukung dan sarana penunjang urusan pemerintahan daerah	Persentase rata-rata capaian kinerja jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100%
9.	Tersedianya barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang siap pakai	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan yang terpelihara dengan baik	100%

No	Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
a.	Bidang Penanaman Modal		
1.	Tersedianya Kebijakan Kemudahan Penanaman Modal	Jumlah Perda PM yang terbit	2 Dokumen
2.	Terlaksananya Evaluasi Kemudahan Penanaman Modal	Jumlah Laporan Evaluasi PM yang tersedia	2 Dokumen
3.	Tersusunnya Peta Potensi	Jumlah Peta Potensi yang tersedia	1 Dokumen
4.	Tersusunnya Strategi Penanaman Modal	Jumlah Dokumen Strategi Promosi yang dibuat	3 Dokumen
5.	Terlaksananya Pameran Promosi penanaman Modal	Jumlah Pameran yang dilaksanakan	2 Event
b.	Bidang Pelayanan terpadu Satu Pintu		
1.	Terlaksananya Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara elektronik	Jumlah Izin yang diterbitkan tepat waktu Jumlah Pemilik Usaha (Perempuan) yang diterbitkan izinnnya	6.000 Izin 1.250 Izin
2.	Terlaksananya layanan konsultasi dan pengelolaan pengaduan Masyarakat	Jumlah Pengaduan yang ditindaklanjuti	5 Pengaduan
3.	Tersedianya data Informasi Perizinan dan Non Perizinan	Jumlah Data yang disediakan	2 Dokumen
c.	Bidang Pengendalian, Pengawasan dan Pengaduan	-	
1.	Terlaksananya kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah pelaku usaha yang mengikuti BIMTEK	244 Pelaku Usaha
2.	Terlaksananya kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Pelaku usaha yang diawasi	15 Kegiatan
d.	Sekretariat		
1.	Tersedianya dokumen perencanaan perangkat daerah yang disusun tepat waktu	Jumlah dokumen perencanaan yang disusun tepat waktu	2 Dokumen
2.	Tersedianya dokumen RKA-SKPD yang disusun tepat waktu	Jumlah dokumen RKA- SKPD yang disusun Tepat Waktu	2 Dokumen
3.	Tersedianya dokumen DPA-SKPD yang disusun tepat waktu	Jumlah dokumen DPA-SKPD yang disusun tepat waktu	2 Dokumen
4.	Tersedianya laporan kinerja perangkat daerah yang disusun tepat waktu	Jumlah dokumen evaluasi kinerja pelayanan perangkat daerah yang disusun	10 Dokumen

5.	Tersedianya laporan penatausahaan Barang Milik Daerah yang tersusun dengan baik	Jumlah dokumen laporan penatausahaan barang milik daerah pada SKPD yang disusun	4 Dokumen
6.	Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kependidikan	Jumlah laporan data administrasi kependidikan yang di mutakhirkan	12 Dokumen
7.	Terlaksananya peningkatan kapasitas bagi aparatur	Jumlah ASN yang mengikuti bimbingan teknis implementasi peraturan perundang - undangan	13 Orang
8.	Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan untuk bangunan kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang di sediakan	15 Jenis
9.	Tersedianya Peralatan kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan kantor Yang diadakan	1 Paket
10.	Tersedianya Peralatan Rumah Tangga untuk kebutuhan kantor	Jumlah Peralatan rumah tangga Yang diadakan	1 Paket
11.	Tersedianya bahan logistik untuk kelancaran pelayanan administrasi perkantoran	Jumlah bahan logistik kantor yang disediakan	2 Jenis
12.	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan untuk kebutuhan kantor	Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	3 Jenis
13.	Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang- undangan	60 Exemplar
14.	Terfasilitasinya makanan dan minuman untuk tamu	Jumlah tamu yang difasilitasi	150 Orang
15.	Terlaksananya kegiatan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi SKPD yang diikuti	350 Kali
16.	Tersedianya peralatan/mesin lainnya untuk kebutuhan kantor	Jumlah peralatan/mesin lainnya yang diadakan	1 Unit
17.	Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung kantor	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang diadakan	1 Unit
18.	Teradministrasinya surat masuk dan surat keluar dengan baik	Jumlah surat masuk dan keluar yang diadministrasi	1000 Surat
19.	Terbayarnya rekening bulanan telepon, air dan listrik kantor demi kelancaran pelayanan administrasi perkantoran	Jumlah rekening telepon, listrik dan air yang terbayarkan	60 Rekening
20.	Tersedianya jasa tenaga pelayanan umum kantor untuk penunjang urusan perkantoran	Jumlah jasa tenaga pelayanan umum kantor yang dibayarkan	4 Orang
21.	Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional dengan baik	Jumlah kendaraan operasional atau lapangan yang dipelihara	9 Unit
22.	Terpeliharanya peralatan dan mesin lainnya dengan baik	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	47 Unit
23.	Terpeliharanya gedung kantor dan bangunan lainnya dengan baik	Jumlah gedung kantor dan/atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	1 Unit
24.	Terbayarnya gaji dan tunjangan ASN	Jumlah ASN yang gaji dan tunjangan terbayarkan	19 Orang

25.	Tersusunnya laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran dan akhir tahun dengan baik	Jumlah dokumen laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran SKPD yang disusun Tepat Waktu	18 Dokumen
-----	--	---	------------

2.4 Rencana Anggaran DMPTSP Tahun 2023

Berdasarkan Peraturan Daerah kabupaten Luwu Timur Nomor 08 Tahun 2023 tentang Anggaran Perubahan Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2023 Nomor 8) tanggal 16 Oktober 2023; Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 78 Tahun 2023 tentang perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2022 Nomor 78) tanggal 16 Oktober 2023. Anggaran Dinas Penanaman Modal dan PTSP mengalami Penambahan sebesar Rp 35.000.000,- dimana anggaran pokok sebesar Rp 4.713.388.125 dan anggaran setelah perubahan sebesar Rp 4.756.588.125,- dengan alokasi belanja sebagai berikut:

Tabel 9.

Program Utama DPMPTSP Kab. Luwu Timur Tahun 2023

NO	SASARAN	PROGRAM		KEGIATAN		ANGGARAN (Rp)	% (ANGGARAN TOTAL BELANJA LANGSUNG)
1.	Meningkatnya Nilai Realisasi Investasi Daerah	1.	Pengembangan Iklim Penanaman Modal	1.	Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota	406.846.885	8,58
		2.	Promosi Penanaman Modal	2.	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota	188.444.480	3,97
		3.	Pengendalian Pelaksanaan	3.	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman	417.091.801	8,80

			Penanaman Modal		Modal yang Menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota		
2.	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan	4.	Pelayanan Penanaman Modal	4.	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu di bidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota	307.191.107	6,48
		5.	Pengelolaan Data dan Sistem Informasi penanaman Modal	5.	Pengelolaan Data dan Informasi perizinan dan Non Perizinan yang terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	29.999.850	0,63

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2023

Akuntabilitas kinerja dalam format Laporan Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Luwu Timur tidak terlepas dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP), fungsi perencanaan (Planning) yang sudah berjalan mulai dari Rencana Strategis (Renstra) yang mengacu pada RPJMD, RKPD, Rencana Aksi Kinerja maupun Rencana Kinerja Tahunan, Rencana Kerja dan Anggaran (RKA), Perjanjian Kinerja hingga pelaksanaan pembangunan Penanaman Modal dan PTSP itu sendiri sebagai fungsi actuating kemudian pertanggungjawaban atas pelaksanaan pembangunan sebagai fungsi controlling.

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas. Pengukuran Kinerja digunakan sebagai dasar untuk penelitian keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang dimaksud, yang ditetapkan dalam Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Luwu Timur. Dalam hal ini Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Luwu Timur melaksanakan kewajiban dengan menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja sesuai dengan yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Pengukuran capaian kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Luwu Timur Tahun 2023 digunakan untuk mengetahui keberhasilannya dalam melaksanakan program dan kegiatan selama 1 (satu) tahun anggaran. Indikator kinerja yang digunakan adalah indikator kinerja sasaran, yang dirumuskan dalam Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021-2026. Sebagaimana yang tercantum dalam Perjanjian Kinerja Perubahan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Luwu Timur Tahun 2023.

3.1 Capaian Kinerja Organisasi

a. Pengukuran Capaian Kinerja Organisasi

Pengukuran capaian kinerja Tahun 2023 merupakan pengukuran dan evaluasi terhadap pencapaian kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Luwu Timur sesuai dengan penetapan kinerja tahun 2023 yang telah disepakati bersama, dalam hal ini antara Kepala OPD dengan Bupati Luwu Timur. Tingkat akuntabilitas kinerja instansi diukur dari setiap komponen yang ada dengan kategori sebagai berikut :

Tabel. 4
Tingkat Akuntabilitas Kinerja

No	Kategori	Nilai Angka	Interpretasi
1.	AA	>90	Sangat memuaskan
2.	A	>80-90	Memuaskan, memimpin perubahan, berkinerja tinggi, dan sangat akuntabel
3.	BB	>70-80	Sangat baik, akuntabel, berkinerja baik, memiliki sistem manajemen kinerja yang andal
4.	B	>60-70	Baik, akuntabilitas kinerjanya sudah baik, memiliki sistem yang dapat digunakan untuk manajemen kinerja, dan perlu sedikit perbaikan
5.	CC	>50-60	Cukup (memadai), akuntabilitas kinerjanya cukup memadai, taat kebijakan, memiliki sistem yang dapat digunakan untuk memproduksi informasi kinerja untuk pertanggung jawaban
6.	C	>30-50	Kurang, sistem dan tatanan kurang dapat diandalkan, memiliki sistem untuk manajemen kinerja tak perlu banyak perbaikan minor dan perbaikan yang mendasar
7.	D	0-30	Sangat kurang, sistem dan tatanan tidak dapat diandalkan untuk penerapan manajemen kinerja, perlu perbaikan yang sangat mendasar

Adapun capaian kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Luwu Timur Tahun 2023 dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 10.
Pengukuran Capaian Kinerja Tahun 2023

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	NOTIFIKASI
1	2	3	4	5	6	7
1.	Meningkatnya Nilai Realisasi Investasi Daerah	Nilai Realisasi Investasi (PMDN dan PMA)	3,5 Triliun	4,024 Triliun	114,98%	●
2.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan perizinan dan Non Perizinan	Rata-rata lama penyelesaian perizinan usaha	72,00	94,29	125,72%	●
3.	Meningkatnya Capaian Kinerja dan Keuangan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Persentase Capaian Kinerja Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	96,00	98,90	103,02	●

Keterangan : ● Mencapai/Melampaui Target ; ● Belum Mencapai Target

3.2 Analisis Capaian Kinerja

Analisis capaian kinerja dilakukan terhadap capaian sasaran strategis dan sasaran program. Dalam menyimpulkan keberhasilan atau ketidakberhasilan pencapaian tiga sasaran strategis dilakukan dengan mengukur dan menganalisa capaian indikator outcome. Analisis capaian sasaran program juga dilakukan sebagai pendukung capaian kinerja sasaran strategis yang dilakukan terhadap indikator kinerja utama. Analisis juga dilakukan terhadap indikator kinerja yang tidak secara langsung mendukung capaian kinerja, namun berpengaruh terhadap perwujudan sasaran program. Analisis efisiensi penggunaan input berupa sumber daya keuangan dan manusia dilakukan terhadap tiap indikator kinerja dengan cara membandingkan capaian indikator kinerja dengan capaian penggunaan sumber daya. Efisiensi sumber daya terjadi manakala capaian indikator kinerja lebih tinggi dari pada capaian penggunaan sumber daya. Analisis efisiensi dilakukan secara terpisah antara sumber daya keuangan dan sumber daya manusia.

Sasaran Strategis I
Meningkatnya Nilai Realisasi Investasi PMA dan PMDN

Tabel 11.

Target dan Realisasi Sasaran Strategis 1 DPMPTSP Tahun 2023

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	(%)	Ket
Terciptanya Iklim Investasi yang Kondusif di Daerah	a. Total Nilai Investasi	Juta Rupiah	3.500.000	4.024.437	114,98	●
	1. Nilai Investasi Modal Asing (PMA)	Juta Rupiah	2.650.000	2.974.791	112,25	●
	2. Nilai Investasi Modal Dalam Negeri (PMDN)	Juta Rupiah	850.000	1.049.645	123,48	●

Sumber : Dinas Penanaman Modal dan PTSP Tahun 2023

Keterangan : ● Mencapai/Melampaui Target ; ● Belum Mencapai Target

Secara total nilai investasi PMA dan PMDN Kabupaten Luwu Timur terealisasi sebesar 114,98% atau sebesar Rp 4.024.437.259.150,- dari target sebesar Rp 3.500.000.000.000,-

Adapun Target Realisasi Investasi Tahun Tahun 2022 dan Tahun 2023 terdapat pada tabel sebagai berikut :

Tabel 12.

Perbandingan Capaian Investasi Berskala Nasional PMA dan PMDN Kaupaten Luwu Timur Tahun 2022 – 2023

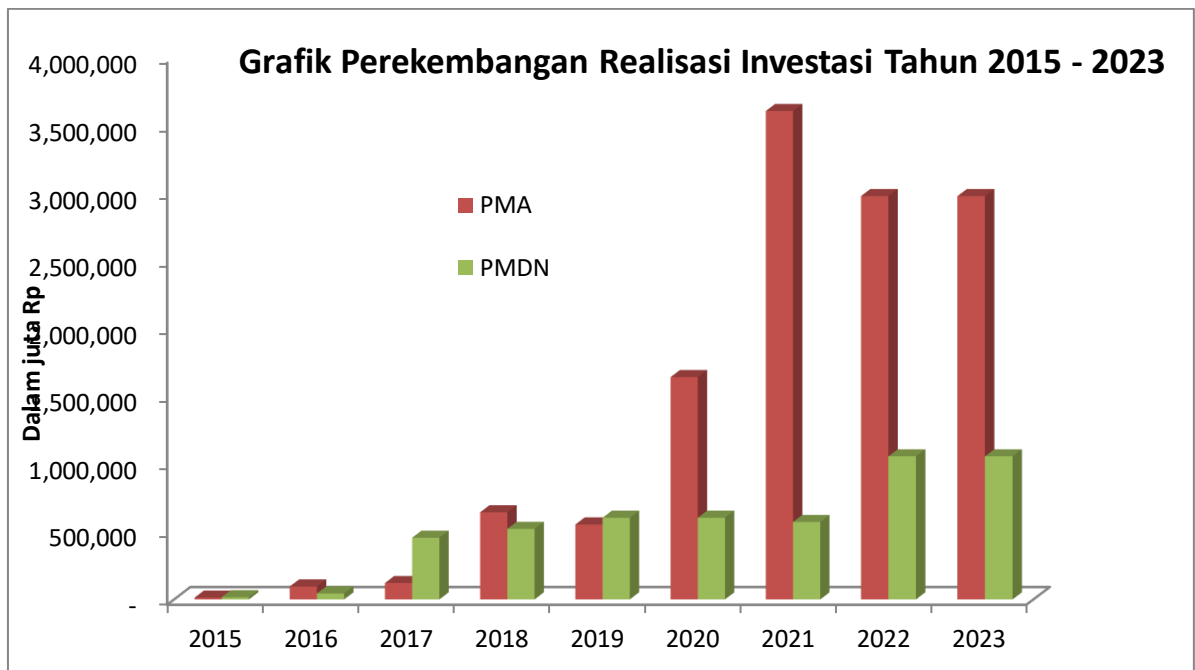
No	Jenis Investasi	Tahun 2022		%	Tahun 2023		%
		TARGET	REALISASI		TARGET	REALISASI	
1	PMA	2.500.000.000.000	2.947.236.398.569	117,88	2.650.000.000.000	2.974.791.374.751	112,25
2	PMDN	800.000.000.000	1.144.862.849.673	143,00	850.000.000.000	1.049.645.884.399	123,48
	TOTAL	3.300.000.000.000	4.092.099.248.242	124,00	3.500.000.000.000	4.024.437.259.150	114,98

Dengan Rumus :

$$\frac{(\text{Jumlah Investasi } n - \text{jumlah investasi tahun } n-1)}{\text{Jumlah Investasi Tahun } n-1} \times 100 \%$$
$$\frac{(\text{Rp } 4.024.437.259.150 - \text{Rp } 4.092.099.248.242)}{\text{Rp } 4.092.099.248.242} \times 100\%$$
$$= (1.65 \%)$$

Dalam realisasi investasi itu, berhasil menyerap 13.339 orang tenaga kerja. Yang terdiri dari Tenaga Kerja Indonesia (TKI) 13.229 orang dan Tenaga Kerja Asing (TKA) 110 orang. Berdasarkan sector, realisasi investasi selama tahun 2023, yakni pertambangan; Listrik, Gas dan Air; Transportasi, gudang dan telekomunikasi; Makanan: dan Jasa Lainnya.

Target Investasi PMA dan PMDN Kabupaten Luwu Timur Tahun 2022 sampai dengan Tahun 2023 dari 3,3 Trilyun bertambah di tahun 2023 sebesar 3,5 T meningkat sebesar 106% , sedangkan realisasi investasi tahun 2022 dari target 3.300.000.000,- terealisasi sebesar Rp. 4.092.099.248.242 atau 124 % sedangkan Tahun 2023 dari target 3.500.000.000.000,- terealisasi sebesar 4.024.437.259.150 atau 114,98 % , sedangkan realisasi investasi dari tahun 2022 sampai dengan 2023 menurun sebesar 1.65 %, disebabkan karena adanya pelaku usaha PMA (PT. Mars dan Bau Hua) mengalami penurunan produksi sehingga sampai pada triwulan IV tahun 2023 melapor tetapi nilainya Kosong. (0), tetapi dari target dan realisasi investasi untuk tahun 2023 sudah tercapai. (dapat dilihat dari Tabel 12).



Tabel. 13
Perbandingan Nilai Realisasi Investasi PMA dan PMDN Tahun 2017 – 2023
(Rp. 000.000,-)

NO	INVESTASI	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	PMA	120.117	639.033	549.259	2.185.879	3.604.254	2.947.236	2.974.791
2	PMDN	452.245	516.916	598.559	1.636.201	567.486	1.144.862	1.049.645

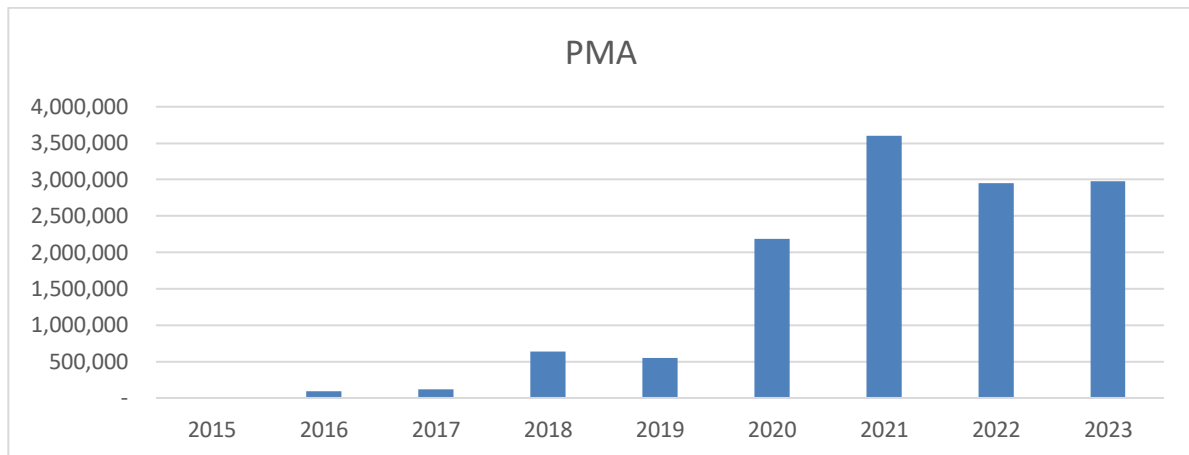
Indikator Kinerja 1.

Nilai Investasi PMA

Secara total nilai investasi PMA dan PMDN Kabupaten Luwu Timur terealisasi sebesar 114,98 % atau sebesar Rp 4.024.437.259.150,-. Pencapaian terjadi pada Nilai Investasi PMA, dapat dilihat pada realisasi capaian tahun 2023. Realisasi investasi PMA sebesar Rp 2.974.791.374.751,- dari target sebesar Rp 2.650.000.000.000,- atau sebesar 112,12%.

Diagram. 2

Persentase Capaian Target Indikator Kinerja 1 DPMPTSP Kab. Luwu Timur dari Tahun 2016 s.d 2023



Penanaman Modal Asing (PMA)

Penjelasan atas pencapaian untuk indikator yang pertama yaitu Nilai realisasi Investasi Modal Asing (PMA) dengan target Rp 2.650.000.000.000,- mencapai realisasi sebesar Rp 2.974.791.374.751,- untuk memperoleh nilai indikator pertama ini diperoleh dari perbandingan antara jumlah realisasi Investasi Modal Asing dalam satu tahun dengan target Investasi Modal Asing dalam tahun bersangkutan dikalikan 100%. Capaian realisasi PMA sebesar 112,12% disebabkan oleh karena adanya penambahan Penanaman Modal Asing yang awalnya pada Tahun 2022 hanya 5 PMA dan Pada Tahun 2023 menjadi 8 PMA sehingga Nilai Realisasi Investasi pada PMA bertambah serta peningkatan kepatuhan Perusahaan menyampaikan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM). Untuk melihat lebih jelas pengukuran indikator kinerja utama dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 14

Realisasi Investasi Modal Asing (PMA)

Uraian	Realisasi LKPM (\$)	Realisasi (Rp) Asumsi \$1 = Rp 15.100,-
1	2	3
PT. Vale	177.328.456	2.677.659.681.366,-
PT. Mars	292.484	4.416.513.755,-
PDS	123.721	1.868.200.000,-
Bao Hua Investment	-	-
Arkora Hydro	18.070.790	272.868.933.071,-
PT. Arkora Hydro Malili	24.391	368.303.389,-
PT. Huali Nickel Indonesia	1.166.208	17.609.743.170
PT. Weda Bay industrial Park	-	-
Total	\$ 196.969.298	Rp 2.947.236.398.569,-

Sumber : Dinas Penanaman Modal dan PTSP Tahun 2023 (nilai tukar Kurs 1\$ = Rp 15.100)

Perkembangan realisasi Investasi berdasarkan LKPM dan izin usaha ini sangat bergantung kepada kepatuhan dan perhatian para pengusaha (PMA) dalam menyampaikan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) setiap tahunnya. Jika

kepatuhan para pengusaha dalam menyampaikan LKPM tersebut semakin baik, maka tidak menutup kemungkinan nilai realisasi investasi pada tahun – tahun berikutnya akan semakin meningkat dan pemerintah daerah dapat memantau perkembangan investasi dengan baik. Akan tetapi, jika hal tersebut tidak dilakukan oleh pengusaha maka tidak menutup kemungkinan nilai realisasi investasi pun akan cenderung menurun bahkan semakin berkurang.

Oleh karena itu, sinergitas antara pengusaha dengan pemerintah daerah harus terus di tingkatkan agar setiap kegiatan investasi di daerah dapat dikendalikan dan terpantau dengan baik sehingga diharapkan iklim investasi di Kabupaten Luwu Timur cenderung lebih kondusif pada tahun-tahun berikutnya. Hal ini tidak terlepas dari peran pemerintah, dengan upaya secara terus menerus meningkatkan pelayanan perizinan.

**Perbandingan Capaian Jumlah Investasi PMA
Kab. Luwu Timur Tahun 2016 - 2023**

Tahun	Persetujuan		Realisasi	
	Jumlah Proyek	Nilai Investasi	Jumlah Proyek	Nilai Investasi
2016	0	-	0	Rp. 268.605.000.000
2017	21	-	21	Rp. 120.117.000.000
2018	34	-	34	Rp. 603.035.000.000
2019	13	-	13	Rp. 549.259.000.000
2020	8		8	Rp. 2.185.879.000.000
2021	8	8.003.575.455.108	8	Rp.3.604.254.631.433
2022	9	183.367.444.000	10	Rp.2.947.236.398.569
2023	20	31.794.525.771.500	12	Rp.2.974.791.374.751

Perbandingan Kinerja

a. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Tahun Sebelumnya

Sebagai salah satu acuan untuk menilai keberhasilan Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Luwu Timur, maka perlu dilihat perbandingan hasil realisasi kinerja dengan tahun sebelumnya.

Indikator nilai investasi PMA pada Tahun sebelumnya (Tahun 2022) terealisasi sebesar Rp 2.947.236.398.569,- dengan target sebesar Rp 2.500.000.000.000,-, artinya capaian kinerja pada Tahun 2022 adalah 117,88% dari target yang ditetapkan. Jika dibandingkan dengan realisasi nilai investasi pada Tahun 2023 yang diperoleh sebesar Rp 2.974.791.374.751,- dengan target sebesar Rp 2.650.000.000.000 tercapai sebesar 112,12 %. maka terdapat kenaikan nilai realisasi investasi PMA sebesar Rp 27.554.976.182.

b. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2023 dengan Tahun Sebelumnya (2022)

Indikator kinerja nilai investasi PMA pada tahun 2022, terealisasi dengan capaian kinerja sebesar 117,88%%. Jika dibandingkan dengan capaian kinerja Tahun 2023 sebesar 112,12% maka terjadi penurunan realisasi sebesar 5%, tetapi hal ini disebabkan karena target kinerja mengalami pertambahan dari 2,5 Triliun (2022) menjadi 2,65 Triliun pada tahun 2023.

c. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Akhir Renstra 2026

Pada Renstra DPMPTSP tahun 2021 - 2026 menetapkan target indikator kinerja nilai investasi PMA untuk kondisi kinerja pada akhir Tahun 2026 adalah sebesar Rp.4.000.000.000.000,00. Apabila realisasi kinerja nilai investasi PMA sampai tahun 2023 sebesar Rp. 2.974.791.374.751,- dibandingkan dengan target akhir Renstra , maka telah mencapai 74,35%.

Indikator Kinerja 2.

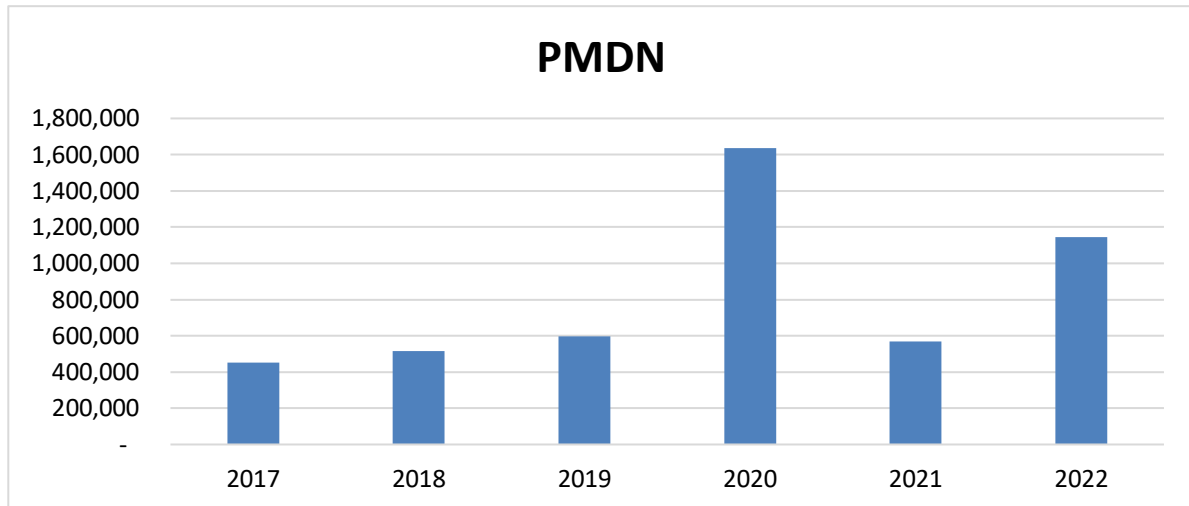
Nilai Investasi PMDN

Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN)

Capaian Indikator Kinerja Utama yang kedua yaitu Nilai realisasi Investasi Modal Dalam Negeri (PMDN) dengan target Rp 850.000.000.000,- mencapai realisasi sebesar Rp 1.049.645.884.399,- untuk memperoleh nilai indikator pertama ini diperoleh dari perbandingan antara jumlah realisasi Investasi Modal Dalam Negeri dalam satu tahun dibagi dengan target Investasi Modal Dalam Negeri pada tahun tersebut dikalikan 100%. Nilai realisasi PMDN hanya mencapai realisasi sebesar 123,49% dari target PMDN Tahun 2023.

Diagram. 3

Persentase Capaian Target Indikator Kinerja 2 DPMPTSP Kab. Luwu Timur dari Tahun 2017 s.d 2022



Tabel 15

Realisasi Investasi Modal Dalam Negeri (PMDN) Tahun 2023

NO	Nama Perusahaan PMDN	Realisasi Investasi
1	ABDUL AZIS M	145.000.000
2	BERNADETH TASIK	500.000.000
3	CV BINTANG MAHALONA PERKASA	300.000
4	CV BINTANG MANDIRI PERKASA	100.000
5	CV CAHAYAGRACIAS	10.000.000
6	CV MASAMBA PUTRA	100.000.000
7	CV UMEGA MANDIRI	150.000.000
8	CV. AGRI DHARMA SANADJAYA	269.000.000
9	CV. AZ-ZAHRA	875.000.000
10	CV. BERKAT FIGRA	200.000.000
11	CV. BINTANG MANDIRI VERBEK	600.000.000
12	CV. BUDI SENTOSA MULTIPLY	900.000.000
13	CV. CARYA ANUGRAH	3.741.105.000
14	CV. FARISA UTAMA KONSTRUKSI	170.000.000
15	CV. HAJI ANSAR NADI	375.040.000
16	CV. HANIN KONSTRUKSION	400.000.000
17	CV. HIJRAH'Q	536.300.000
18	CV. KANNA	435.000.000
19	CV. KARYA MENTARI	2.830.000.000
20	CV. MASAMBA PUTRA	60.000.000
21	CV. MELATI SUKSES MANDIRI	1.917.220.000
22	CV. MUTIARA MAS	1.486.000.000
23	CV. PAKALA KEMBAR JAYA	86.000.000
24	CV. PUTRA BUNGSU SESA	660.000.000
25	CV. QAIRAH PRATAMA	20.000.000
26	CV. SARAMAI MANDIRI	507.500.000
27	CV. SARANA TIMUR	1.000.000

28	CV. SINAR GESSONG BARAKKA	175.000.000
29	CV. TRI ADETA PRATAMA	760.740.937
30	HARIYADI	75.000.000
31	HOTEL ILAGALIGO	180.000.000
32	KANTOR ADMINISTRASI KONTRAKTOR KONSTRUKSI	5.230.000.000
33	NASMASRIATI	775.000.000
34	NIRAMADANI	957.000.000
35	PT BAGUS KARYA SOROWAKO	15.000.000
36	PT BUMI PERSADA TIMUR	27.000.000
37	PT DAYAMITRA TELEKOMUNIKASI	1.440.000
38	PT KAHALA MINERA	42.606.433
39	PT KELAPA GADING BERLIAN	115.000.000
40	PT PUPUK INDONESIA NIAGA	6.111.110
41	PT PUTRA AL MAIDAH UTAMA	200.000.000
42	PT RUSTIKA GLOBAL INDONESIA	547.415
43	PT SINAR SENTOSA UTAMA	2.935.000.000
44	PT SUMBER ALFARIA TRIJAYA	4.565.000
45	PT SUMBER WAHAU JAYA	42.606.433
46	PT TIGENCO GRAHA PERSADA	5.000.000
47	PT USA RIZQ SENTOSA	10.000.000
48	PT. ABE BAROKAH JAYA	450.000.000
49	PT. ALIMAS REYHAN MANDIRI	29.556.000.000
50	PT. AMAL SEHAT INDONESIA	150.000.000
51	PT. ANANDA PONGKERU JAYA	1.108.000.000
52	PT. ANEKA JASA SOROWAKO	63.908.988.253
53	PT. ANEKA WIJAYA PUTRA	3.622.542.000
54	PT. ANGKASA JASA MULIA	7.614.386.760
55	PT. ANUGRAH ADHI SANTHI	910.000.000
56	PT. ANUGRAH TIMUR GAS	600.000.000
57	PT. AOS ARROYAN JAYA	2.605.000.000
58	PT. ARBA INSAN MULYA	631.000.000
59	PT. ARKORA HIDRO MALILI	368.303.389
60	PT. ARMADA TUNASJAYA ABADI	211.295.200
61	PT. ARTHAVEST PUTRA ANANTAMA	974.000.000
62	PT. BARUGA MANDIRI PRATAMA	230.000.000
63	PT. BERDIKARI INTI SENTOSA	2.000.000.000
64	PT. BERLIAN NUHA PERSADA	805.000.000
65	PT. BETHANY RAYAPERKASA	1.500.000.000
66	PT. BINTANG JAYA WASUPONDA	9.300.000
67	PT. BINTANG MANDIRI VERBECK	739.000.000
68	PT. CARLY ALFA TIMUR	500.000.000
69	PT. CITRA LAMPIA MANDIRI	85.575.000
70	PT. CUPUMANIK GEMAH PERMATA	379.000.000
71	PT. DAFFA SAPUTRA JAYA	2.150.000.000
72	PT. DAYA INDAH YASA	1.492.930.693
73	PT. DAYA INDAH YASA (MR. DIY TOMONI)	1.488.309.097
74	PT. DAYAMITRA TELEKOMUNIKASI	51.714.263
75	PT. DELAPAN DELAPAN TOWUTI	3.350.000.000
76	PT. DELAPAN INTAN MUTIARA	1.000.000
77	PT. DUPA WANGI KONSTRUKSI	220.265.000.000
78	PT. DWIQA SHARA SOLUSI	3.450.000.000
79	PT. ERSAN PRATAMA MANDIRI	2.000.000.000
80	PT. FAHRUL JAYA MANDIRI	71.000.000
81	PT. FAUZUL MEDIKA PERKASA	254.000.000
82	PT. FIRAD MANDIRI	2.000.000.000
83	PT. GERBANG HARAPAN MULTIERA	2.000.000
84	PT. GLOBAL ASISTENSI MEDIKA	472.844.527
85	PT. GRAHA AGRO NUSANTARA RAYA	35.000.000
86	PT. HADJI KALLA	308.898.064
87	PT. HALU MORINI WASUPONDA	20.000.000
88	PT. HARAPAN SEJAHTERA UTAMA	2.070.000.000
89	PT. HARRY PRATAMA SOROWAKO	201.112.150
90	PT. INDOMARCO PRISMATAMA	1.129.375.169

91	PT. INDRA PRATAMA WASUPONDA	5.260.430.184
92	PT. KAHALA MINERA	215.224.019
93	PT. KEPALA GADING BERLIAN	120.000.000
94	PT. LUWU TIMUR INDUSTRIAL PARK	5.653.261.861
95	PT. MAHAMERU MITRA MAKMUR	2.000.000
96	PT. MAHARANI SYAM GROUP	3.000.000.000
97	PT. MANDIRI HARAPAN JAYA	50.000.000
98	PT. MANDIRI PALMERA AGRINDO	92.886.537.794
99	PT. MIRASA	250.000.000
100	PT. MOJONG MITRA MAJU	224.055.972
101	PT. NICKEL PRIMA UTAMA	2.235.000.000
102	PT. NISCALA LINIER INDONESIA	24.000.000
103	PT. NUSA SEJAHTERA BINA ENERGI INDONESIA	100.000.000
104	PT. NUSA SEJAHTERA BINA ENERGI INDONESIA	620.000.000
105	PT. NUSANTARA INDO PROPERTI PALOPO	4.400.000.000
106	PT. PALMA ANUGERAH MARITIM	390.000.000
107	PT. PERKEBUNAN NUSANTARA XIV	21.661.486.583
108	PT. PERUSAHAAN PERDAGANGAN INDONESIA	32.075.509.260
109	PT. PONGKERU MUTIARA ABADI	840.000.000
110	PT. PRIMA UTAMA LESTARI	20.688.363.851
111	PT. PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA	2.971.417.304
112	PT. PUMA JAYA UTAMA	4.631.000.000
113	PT. PUPUK INDONESIA NIAGA	5.500.000
114	PT. PUTRA WASUPONDA MANDIRI	1.551.000.000
115	PT. QIRANI TRIDAYA KARYA	2.230.000.000
116	PT. RANTE ANGIN MINERALINDO	365.000.000
117	PT. SAMATOR INDO GAS	150.988.139.342
118	PT. SANAGI INDONESIA PROPERTY	25.000.000
119	PT. SINAR ADHIO	152.050.000
120	PT. SULINDO PUTRA TIMUR	1.668.300.000
121	PT. SUMBER ALFARIA TRIJAYA	2.476.477.035
122	PT. SUMBER ALFRIA TRIJAYA	93.483.282
123	PT. SUMBER GRAHA SEJAHTERA	14.083.403.587
124	PT. SUMBER WAHAU JAYA	262.606.433
125	PT. TANAH TIMUR PROPERTI	10.700.384.000
126	PT. TARUNA MANDIRI UTAMA	45.000.000
127	PT. TEGUH WIRA PRATAMA	3.377.963.703
128	PT. TELEKOMUNIKASI SELULER	5.065.703.350
129	PT. TIGENCO GRAHA PERSADA	5.000.000
130	PT. TORASINA TEKNIK KONTRUKSI	2.700.000.000
131	PT. TOWUTI PURNAMA JAYA	1.981.550.100
132	PT. TRAKINDO UTAMA	120.000.000
133	PT. TRI MACHMUD JAYA	104.310.000
134	PT. USA RIZQ SENTOSA	35.000.000
135	PT. USU HYDRO POWER	70.381.315.772
	PT. UWAIS MANDIRI UTAMA	134.517.112.908
136	PT. WAHANA MULTI NIAGA	33.450.600.000
137	PT. WIRANA BEVELINDO UTAMA	137.500.000
138	PT. WIRATMAN	2.526.774.281
139	PT. WIZARD MEDICAL CENTRE	1.821.070.000
140	PT. ADHI GUNA SOROWAKO	1.006.660.000
141	PT. ARIEF ABDULLAH PERDANA	19.706.000.000
142	PT. HARINDO GAS	350.000.000
143	PT. KAHALA MINERA	300.436.885
144	SUKMAWATI SULAIMAN (KLINIK KHARISMA MEDIKA)	141.500.000
145	SUPRIONO	670.000.000
T O T A L PMDN		1.049.645.884.399

Tabel. 16
Jumlah Nilai Investasi Berskala Nasional PMDN
Kab. Luwu Timur Tahun 2017-2023

Tahun	Persetujuan		Realisasi	
	Jumlah Proyek	Nilai Investasi (Rp)	Jumlah Proyek	Nilai Investasi (Rp)
2017	30	416.715.000	30	452.245.000.000
2018	34	646.710.000.000	34	516.916.000.000
2019	32	6.120.947.250.000	32	598.558.569.406
2020	21	1.838.630.911.080	21	1.636.201.132.539
2021	41	1.932.338.626.816	422	567.486.903.997
2022	1749	5.072.166.453.138	131	1.114.862.849.673
2023	9262	3.488.504.120.743	72	1.049.645.884.399

Perbandingan Kinerja

a. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Tahun Sebelumnya

Pada tahun 2022, Indikator nilai investasi PMDN terealisasi sebesar Rp. 1.144.862.849.673,- dengan Target sebesar Rp. 800.000.000.000,- maka terealisasi sebesar 143,00%. Jika dibandingkan dengan realisasi nilai investasi PMDN tahun 2023 yang diperoleh sebesar Rp. 1.049.645.884.399,- dengan Target sebesar Rp. 850.000.000.000,- maka tercapai sebesar 123,49%.

b. Perbandingan Capaian Kinerja dengan Triwulan Sebelumnya

Indikator kinerja nilai investasi PMDN pada tahun 2022, terealisasi dengan capaian kinerja sebesar 143,00%. Jika dibandingkan dengan capaian kinerja pada tahun 2023 sebesar 123,49% maka terjadi kenaikan sebesar 19,51 point. Nilai Realisasi Investasi PMDN mengalami penurunan dari Tahun 2022 ke Tahun 2023 disebabkan:

1. kesadaran dan tingkat kepatuhan PMDN dalam melakukan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) semakin tinggi tetapi dari banyaknya Perusahaan yang melaporkan LKPM pada Tahun 2023 masih ada beberapa Pelaku Usaha yang melaporkan nilai realisasi investasinya dengan nilai NIHIL. Hal itu disebabkan karena tidak adanya aktivitas yang berjalan pada Tahun tersebut.
2. Beberapa PMDN yang menjadi mitra kerja dengan perusahaan besar belum aktif dilokasi disebabkan karena masih menunggu verifikasi dan kontrak kerja (bersifat Sub Kontraktork), sehingga berpengaruh pada pelaporan LKPM.

c. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Akhir Tahun 2026

Pada Renstra DPMPTSP tahun 2021 - 2026 menetapkan target indikator kinerja nilai investasi PMDN untuk kondisi kinerja pada akhir Tahun 2026 adalah sebesar Rp.1.000.000.000.000,00. Apabila realisasi kinerja nilai investasi PMDN tahun 2023 sebesar Rp. 1.049.645.884.399,- dibandingkan dengan target akhir tahun, maka telah mencapai 104,9%.

❖ Program dan kegiatan yang mendukung pencapaian sasaran Nilai Realisasi Investasi Daerah yaitu :

A. **Program Pengembangan iklim Penanaman Modal** didukung oleh 2 (dua) kegiatan dan 3 (tiga) Subkegiatan yaitu :

1. Kegiatan Penetapan pemberian Fasilitas/Insentif dibidang Penanaman Modal yang menjadi kewenangan Daerah Kab/Kota:
 - a. Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal, Subkegiatan ini adalah kegiatan pendampingan dan fasilitasi bagi UKM dengan Bank dan pihak-pihak pemberi pinjaman dan kemudahan pemberian modal.
 - b. Penetapan Kebijakan Daerah mengenai pemberian fasilitas/insentif dan kemudahan Penanaman Modal, subkegiatan ini adalah kegiatan penyediaan PERDA penanaman modal yang akan digunakan sebagai regulasi dalam kegiatan peningkatan investasi.

B. **Program Promosi Penanaman Modal** didukung oleh 1 (satu) kegiatan dan 2 (dua) Subkegiatan yaitu :

1. Kegiatan Penyelenggaraan Promosi penanaman Modal yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten/Kota, terbagi menjadi 2 subkegiatan yaitu:
 - c. Subkegiatan Penyusunan strategi promosi penanaman modal yang indikatornya yaitu jumlah media promosi Penanaman Modal. Jumlah media yang digunakan adalah media surat kabar yang digunakan untuk meliput pemberitaan Penanaman Modal. Pada tahun 2023 terealisasi 2 media.
 - d. Subkegiatan Pelaksanaan kegiatan promosi penanaman modal Daerah Kabupaten/Kota, indikator subkegiatan adalah jumlah kegiatan promosi penanaman modal yang diikuti/dilaksanakan, kegiatan pameran terealisasi dan dilaksanakan antara lain Pameran APKASI di JCC Jakarta dan Pameran Dekranasda Di Makassar

C. **Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal**, didukung 1 (satu) kegiatan dan 2 Subkegiatan yaitu :

1. Kegiatan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi kewenangan Daerah kabupaten/kota, sumber Pendanaan Dana Transfer Khusus DAK non Fisik , yang terbagi menjadi 2 subkegiatan yaitu:
 - a. Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman modal, dengan indicator kinerja adalah Kegiatan pelaksanaan Bimtek kepada pelaku usaha PMDN dan UKM. Realisasi pada Tahun 2023 sebanyak 244 orang dan terealisasi 100%.
 - b. Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman modal, dengan indicator kinerja adalah kegiatan pengawasan kepada pelaku usaha PMDN dan UKM. Pada Tahun 2023 target kinerja sebanyak 15 kali kegiatan dan terealisasi sebanyak 15 kali kegiatan.

➤ **Hambatan/Kendala**

Dalam pencapaian indikator Nilai Realisasi investasi, terdapat beberapa hambatan atau kendala yang dihadapi yaitu :

- Keterbatasan anggaran untuk Pembuatan peta potensi dan Perda penanaman modal yang melekat pada OPD strategis dan bukan hanya di DPMPTSP
- Ketersediaan data dan informasi dari OPD terkait
- Pelaksanaan pengerjaan peta potensi dan PERDA Penanaman Modal sangat tergantung dari berbagai instansi, pihak legislative (DPRD) belum terlaksana karena keterlambatan PPTK dalam merespon kegiatan sesuai anggaran kas.
- Belum terbitnya Perda mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif Penanaman Modal yang menjadi kewenangan daerah Kabupaten/Kota yang mengatur tentang pemberian Fasilitas/Insentif Penanaman Modal, hal ini disebabkan belum adanya nomor registrasi Peraturan daerah (Perda) dari Biro Hukum Setda Provinsi Sulawesi Selatan.
- Terhadap perkembangan investasi Kabupaten Luwu Timur data yang disampaikan baru berdasarkan terhadap izin yang diterbitkan sehingga belum mencerminkan data investasi secara keseluruhan.
- Peluang investasi yang dipromosikan belum menggambarkan permintaan pasar yang membuat calon investor tertarik berinvestasi.

➤ **Solusi**

Untuk menjawab permasalahan atau kendala yang dihadapi, maka telah dilakukan beberapa solusi yaitu :

- Mengusulkan kepada pihak team TAPD dan Bappelitbangda untuk mengalokasikan dana yang lebih besar
- Meningkatkan pembinaan dan pemantauan kepada PMA/PMDN yang menanamkan investasinya di Kabupaten Luwu Timur, sehingga data investasi dan nilai investasi bisa lebih akurat.
- Perlu dilakukan kajian yang mendalam dengan pendekatan yang komprehensif untuk semua peluang investasi yang ditawarkan.
- Melakukan penjemputan data dan informasi ke OPD terkait

➤ **Efisiensi Anggaran**

Dalam pencapaian sasaran strategis DPMPTSP, dilakukan beberapa efisiensi anggaran yaitu :

- Penyesuaian dan perubahan anggaran pada sub kegiatan Penetapan kebijakan Daerah mengenai Pemberian Fasilitas/insentif dan kemudahan Penanaman Modal . Perubahan terjadi pada Belanja ATK, belanja cetak, makan minum rapat dan perjalanan dinas.

➤ **Efisiensi Sumber Daya**

- Dengan keterbatasan sumber daya sarana, prasarana dan tenaga dalam menyampaikan informasi Investasi dan peluang usaha di Daerah maka dapat terfasilitasi dengan adanya Media Koran, website, aplikasi LKPM, dokumen Peta potensi.
- Sumber daya yang ada pada DPMPTSP Kabupaten Luwu Timur baik sumber daya manusia maupun sumber daya peralatan masih belum memadai, namun dengan keterbatasan tersebut, DPMPTSP tetap berupaya untuk bekerja maksimal dalam penyebaran informasi. Sumber daya manusia yang ada di DPMPTSP Kabupaten Luwu Timur sebanyak 40 orang yang terdiri dari 19 orang PNS, 21 orang Upah Jasa.

Tabel. 17
Pencapaian Kinerja dan Anggaran

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran		
		Target	Realisas	Capaian (%)	Alokasi	Realisasi	Capaian (%)
1	2	3	4	5	6	7	8
Meningkatnya Nilai Realisasi Investasi	Nilai realisasi investasi	3,5 Triliun	4,024 Triliun	114,98%	161.694.290,-	157.140.624,-	97,18%
	Jumlah Investor PMA dan PMDN yang berskala Nasional	40	67	167,50%	180.998.490,-	87.051.940,-	48,10%
	Persentase Pelaku Usaha yang Taat terhadap Peraturan yang terkait Penanaman Modal	75%	73,59%	98,12%	469.500.000,-	400.591.291,-	85,32%

1. Perbandingan antara target dan realisasi TA. 2023
dengan Tahun sebelumnya

Tabel. 18
Perbandingan Target dan Realisasi Sebelumnya

Sasaran I :	Meningkatnya Nilai realisa investasi Daerah						Target Tahun 2021
Indikator Kinerja Sasaran	Tahun 2023			Tahun 2022			
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	
Nilai Realisasi Investasi	3,5 Triliun	4,024 T	114,98 %	3,3 Triliun	4,092 T	124 %	3 Triliun

Berdasarkan tabel diatas maka dapat dijelaskan bahwa capaian tahun 2023 lebih rendah dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya (2022). Hal ini disebabkan karena adanya kesadaran pelaku usaha (PMA/PMDN) dalam melaporkan realisasi kegiatannya dalam aplikasi LKPM, selain itu Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) mengalami peningkatan jumlah investor dalam berusaha.

Target yang meningkat setiap tahunnya disesuaikan dengan target dalam Renstra DPMPTSP 2021-2026.

2. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2023 dengan Target Jangka Menengah

Berdasarkan realisasi sampai dengan tahun 2023 jika dibandingkan dengan target yang direncanakan sampai dengan tahun 2026, sangat memungkinkan dapat dicapai. Dan upaya yang dilakukan adalah melakukan pemutakhiran Nilai realisasi investasi setiap tahunnya.

Adapun perbandingan antara target dan capaian pada tahun 2023 dengan target jangka menengah pada Renstra DPMPTSP Kabupaten Luwu Timur 2021-2026 dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel. 19
Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2022 Terhadap Target Jangka Menengah (2021 - 2026)

Sasaran I :	Meningkatnya Ketahanan Daerah menghadapi Bencana		Target Akhir Renstra 2026	% Capaian s/d 2022 terhadap target akhir Renstra 2026
Indikator Kinerja Sasaran	Realisasi			
	Tahun 2022	rata-rata realisasi sampai dengan tahun 2023		
Nilai realisasi investasi Daerah	4,024 Triliun	4,024 Triliun	4 Triliun	100%

3. Perbandingan Capaian Realisasi Investasi Kabupaten dengan Capaian Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2023.

Realisasi investasi tahun 2023 di Sulawesi Selatan sebesar Rp 16,415 Triliun. Nilai itu berhasil melebihi target RPJMD Provinsi Sul-Sel Tahun Anggaran 2023 untuk investasi senilai Rp 14,55 Triliun.

Berdasarkan data Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Sulsel, realisasi investasi selama tahun 2023 senilai Rp 16,415 Triliun itu, terdiri dari Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) Rp 11,468 Triliun dan Penanaman Modal Asing (PMA) Rp 4,983 Triliun.

Dalam realisasi investasi itu, berhasil menyerap 19.186 orang tenaga kerja. Yang terdiri dari Tenaga Kerja Indonesia (TKI) 18.969 orang dan Tenaga Kerja Asing (TKA) 217 orang. Berdasarkan sector, realisasi investasi selama tahun 2023, yakni industri logam dasar 11% (Rp 434M); pertambangan 28% (Rp 1,121T); Listrik, Gas dan Air 15% (Rp 585M); Transportasi, gudang dan telekomunikasi 12% (Rp 488M); Jasa Lainnya 9% (Rp 375M).

Bila dibandingkan dengan capaian Realisasi Investasi Kabupaten Luwu Timur sebesar Rp 4,024 Triliun maka tercapai sebesar:

$$= (4,024 / 16,415) \times 100\%$$

$$= 24,51 \%$$

Sasaran Strategis 2 Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan

Tabel . 20

Target dan Realisasi Sasaran Strategis 2 DPMPTSP Tahun 2022

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Satuan	Target	Realisasi	(%)
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan	a.	Rata-rata lama penyelesaian Perizinan dan Nonperizinan	%	75,00	94,29	125,72

Sumber : Dinas Penanaman Modal dan PTSP Tahun 2023

Rata-rata lama penyelesaian Perizinan dihitung dengan cara membagi antara jumlah izin yang diterbitkan tepat waktu dibagi dengan jumlah permohonan izin yang masuk dikalikan dengan 100%.

$$\text{Rata-rata penyelesaian Perizinan} = \frac{\sum \text{izin yang terbit tepat waktu}}{\sum \text{seluruh Berkas yang masuk}} \times 100\%$$

Jumlah total Berkas Masuk : 11.135 berkas
 Jumlah total izin terbit : 11.261 izin
 Jumlah izin terbit tepat waktu : 10.499 izin
 Rata-rata penyelesaian izin = (10.499 : 11.135) x 100
 = 94,29 %

Kegiatan Survey Kepuasan Masyarakat di Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Kab. Luwu Timur dimaksudkan untuk mengetahui tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja unit pelayanan secara berkala. Survey ini dimaksudkan untuk:

1. Memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk melakukan penilaian terhadap kinerja pelayanan di DPMPTSP Kab. Luwu Timur sebagai perwujudan partisipasi masyarakat dalam pengawasan pelayanan publik.
2. Mengukur kinerja subjektif pelayanan berdasarkan perspektif masyarakat penerima layanan perizinan yang diselenggarakan oleh DPMPTSP Kab. Luwu Timur .
3. Mendapatkan masukan dari masyarakat yang secara langsung menerima dan merasakan pelayanan DPMPTSP Kab. Luwu Timur yang dapat dijadikan sebagai dasar perumusan kebijakan peningkatan kualitas layanan.

Adapun tujuan yang ingin dicapai dari pelaksanaan Survey Kepuasan Masyarakat ini adalah :

1. Untuk mengetahui kualitas pelayanan perizinan di DPMPTSP Kab. Luwu Timur menurut penilaian masyarakat.
2. Untuk menjadi dasar dalam merumuskan kebijakan peningkatan kualitas pelayanan publik.
3. Untuk meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang diselenggarakan oleh DPMPTSP Kab. Luwu Timur sehingga mampu menciptakan iklim Usaha dan kemudahan berusaha yang kondusif di Kabupaten Luwu Timur.

Untuk mengoptimalkan kualitas pelayanan, pemerintah terus melakukan terobosan baru melalui pendekatan masyarakat, guna mendorong partisipasi aktif menyangkut dalam pembangunan. Olehnya itu Kementrian Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 16 tahun 2014 telah menetapkan kebijakan tentang pedoman survey kepuasan masyarakat (SKM) terhadap penyelenggaraan pelayanan public, pedoman itu dimaksudkan sebagai acuan untuk mengevaluasi tingkat kinerja instansi DPMPTSP dan diharapkan memberikan kepastian masyarakat dalam menilai secara objektif dan continue terhadap perkembangan kinerja unit pelayanan public di DPMPTSP.

Target tahun 2023 Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap pelayanan perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kab. Luwu Timur sebesar 85,30 atau kategori “baik”. Pada tahun 2023 dari hasil survey IKM, kepuasan pelayanan masyarakat terhadap pelayanan perizinan sebesar 87,84 atau mencapai 102,97 % dari target yang ditetapkan.

Dalam penyusunan SKM digunakan kuesioner sebagai alat bantu pengumpulan data. Kuesioner tersebut diisi oleh masyarakat yang berurusan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Tabel. 21

Indeks Kepuasan Masyarakat

Nilai Persepsi	Nilai Interval IKM	Nilai Intervar Konversi IKM	Mutu Pelayanan	Kinerja Unit Pelayanan
1	1.00 – 1.75	25 – 64.99	D	Tidak Baik
2	1.76 – 2.50	65.00 – 76.60	C	Kurang Baik
3	2.51 – 3.25	76.61 – 88.30	B	Baik
4	3.26 – 4.00	88.31 – 100.00	A	Sangat Baik

Sumber : Dinas Penanaman Modal dan PTSP Tahun 2023

Dalam penyusunan SKM digunakan kuesioner sebagai alat bantu pengumpulan data. Kuesioner tersebut diisi oleh masyarakat yang berurusan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, kuesioner tersebut terdapat 9 unsur pelayanan. Jumlah SKM sampai dengan bulan Januari s.d Desember 2023 **sebanyak 357 lembar kuesioner**. Dengan menggunakan perhitungan rumus dan cara yang ditetapkan sesuai pedoman umum penyusunan SKM Nomor 16 tahun 2014, jumlah kategori tingkat pelayanan yang disesuaikan Survey Kepuasan Masyarakat 87,84 (Baik).

Tabel. 22

Nilai Unsur-Unsur Pelayanan

No	UNSUR PELAYANAN	NILAI RATA-RATA
U1	Persyaratan	3,529
U2	Prosedur Pelayanan	3,451
U3	Ketepatan Waktu Pelayanan	3,367
U4	Biaya/tarif	3,975
U5	Produk Layanan	3,291
U6	Kompetensi pelaksana	3,457
U7	Perilaku Pelaksana	3,448
U8	Sarana dan Prasarana	3,482
U9	Penanganan Pengaduan	3,622
NRR Unsur = 31,622		

Sumber : Dinas Penanaman Modal dan PTSP Tahun 2023

Dari tabel tersebut di atas, maka dapat dihitung Nilai IKM Tahun 2023 sebagai berikut:

$$\begin{aligned}\text{NRR Tertimbang} &= \text{NRR Unsur} \times 1/9 \\ &= 31,622 \times 1/9 \\ &= 3.1535\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\text{IKM} &= \text{Total NRR Tertimbang} \times 25 \\ &= 3,510 \times 25 \\ &= \mathbf{87,84}\end{aligned}$$

Tabel. 23

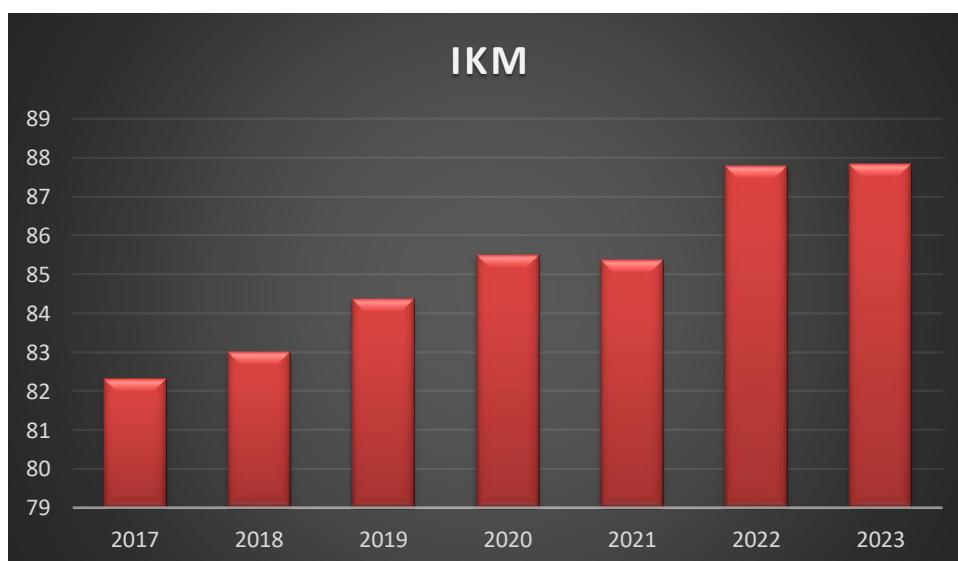
Perbandingan Target dan Capaian IKM Tahun 2020 - 2023

CAPAIAN IKM	TARGET	REALISASI	(CAPAIAN)	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	
Tahun 2020	85,01	85,51	100,59	●
Tahun 2021	85,01	85,37	100,42	●
Tahun 2022	85,20	87,80	103,05	●
Tahun 2023	85,30	87,84	103,05	●

Keterangan : ● Mencapai/Melampui Target ; ● Belum Mencapai Target

Diagram. 4

Persentase Capaian IKM DPMPTSP Kab. Luwu Timur dari Tahun 2017 s.d 2023



Terlihat bahwa kepuasan masyarakat terhadap pelayanan perizinan Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Luwu Timur adalah Sangat Baik, dan **kepuasan masyarakat tertinggi** adalah dalam unsur **Biaya/Tarif**, karena Pemerintah sudah menggratiskan semua biaya pengurusan perizinan kecuali pada biaya Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) yang dulu dikenal dengan istilah Izin Mendirikan Bangunan (IMB).

IKM pada Tahun 2023 lebih tinggi dari pada Tahun 2022 disebabkan karena telah dilakukan tindak lanjut dan perbaikan ditahun 2023 atas hasil SKM Tahun 2022.

4. Perbandingan Capaian Realisasi Kepuasan Masyarakat (IKM) Kabupaten dengan Capaian Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2023.

Tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PMPTSP) Prov. Sulsel cukup baik. Dilihat dari Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) pada Semester IV Tahun 2023 berada di angka **82,02**.

Kepala Dinas PMPTSP prov. Sulsel, menjelaskan, Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) merupakan tolak ukur untuk menilai sejauh mana tingkat kualitas pelayanan yang diberikan oleh unit pelayanan publik. Oleh karena itu, Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan pada Seksi Pengaduan Penanaman Modal DPMPTSP Prov. Sulsel bekerjasama melakukan survey Kepuasan Masyarakat dengan menggandeng CV.Globalindo ProNetwork yang merupakan unit usaha dari Yayasan Adil Sejahtera (YAS) Indonesia.

"Survey ini dilakukan sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dan mengetahui kinerja pelayanan aparatur pemerintah kepada masyarakat," Dalam survey yang dilakukan, ada sejumlah variabel yang diukur. Antara lain, persyaratan pelayanan, prosedur pelayanan, waktu pelayanan, biaya pelayanan, produk pelayanan, kompetensi pelaksana, perilaku pelaksana, Penanganan pengaduan saran dan masukan hingga sarana dan prasarana.

"Secara umum, rata-rata tingkat kepuasan masyarakat terhadap kualitas pelayanan perizinan di Dinas PMPTSP Prov. Sulsel adalah baik,". Nilai SKM persyaratan pelayanan, menurut kadis DPMPTSP Prov. Sulsel, mendapatkan nilai **83,70**. Persyaratan pelayanan yang didapatkan, sesuai dengan yang diinformasikan, dan tergolong mudah. Sedangkan dimensi prosedur pelayanan, sesuai dengan prosedur yang diinformasikan sebelumnya, dan tergolong sederhana. SKM prosedur pelayanan mendapatkan nilai **81,38**.

"Survey juga menunjukkan bahwa untuk waktu pelayanan tergolong cepat, biaya pelayanan murah, produk pelayanan yang diberikan bermutu tinggi. Selain itu, petugas pelayanan sangat tanggap dan cepat dalam melayani masyarakat,". Sekedar informasi, populasi survey ini merupakan masyarakat yang telah menerima layanan administrasi perizinan dan non perizinan pada kantor Dinas PMPTSP Sulsel dalam rentang waktu sejak Januari – Desember 2023. Data populasi yang dikumpulkan 8.500 orang.

Bila dibandingkan antara capaian realisasi IKM DPMPTSP Kab. Luwu Timur dengan capaian kinerja DPMPTSP Provinsi Sulawesi Selatan maka :

$$= (87,84 / 83,70) \times 100\%$$

$$= 104,94 \%$$

Kegiatan 1. Pelayanan Perizinan

Dalam rangka memberikan kemudahan dan percepatan pelayanan perizinan dan non perizinan di dalam melakukan kegiatan usaha, maka pemerintah daerah kabupaten Luwu Timur mengeluarkan Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 55 Tahun 2017 tentang Penyederhanaan Perizinan dan Non Perizinan serta Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan dari Bupati Kepada Kepala Dinas DPMPTSP Kab. Luwu Timur.

Merujuk pada regulasi tersebut diatas, penyederhanaan jenis perizinan dan non perizinan merupakan penyederhanaan jumlah dan jenis perizinan dan non perizinan, dari 142 jenis menjadi 34 jenis perizinan dan non perizinan.

Dinas Penanaman Modal dan PTSP dituntut melaksanakan tugas dan fungsi dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran strategis dengan efektif dan efisien dengan menunjukkan kinerja yang lebih baik. Wujud kinerja dapat dilihat dalam bentuk meningkatnya kecepatan pelayanan perizinan. Kecepatan pelayanan perizinan dapat diukur dengan menggunakan indikator persentase jumlah izin yang diterbitkan. Semakin tinggi persentase jumlah izin yang diterbitkan, maka kinerja DPMPTSP semakin meningkat.

Persentase jumlah izin yang diterbitkan dihitung dengan cara membagi antara jumlah izin yang diterbitkan dibagi dengan jumlah permohonan izin yang masuk dikalikan dengan 100%.

$$\text{Persentase Jumlah Izin yang diterbitkan} = \frac{\sum \text{izin yang diterbitkan}}{\sum \text{seluruh Berkas yang masuk}} \times 100\%$$

Pada tahun 2022, persentase jumlah izin yang diterbitkan adalah sebagai berikut:

- a. Jumlah seluruh berkas yang masuk 11.135 berkas
- b. Jumlah izin yang diterbitkan 11.261 izin
- c. Persentase jumlah izin yang diterbitkan 100%

Tabel. 24
Persentase surat izin yang diterbitkan Tahun 2017 - 2023

Tahun	Target	Realisasi	%
2017	-	1.919	-
2018	2.400	2.947	122,79
2019	2.500	2.826	113,04
2020	4.000	4.376	109,40
2021	4.000	4.748	118,70
2022	4.100	5.474	133,51
2023	6.000	11.261	187,68

Nilai realisasi Izin mencapai 187,68% disebabkan :

1. Adanya kemudahan Perizinan berbasis elektronik, sehingga pendaftaran bisa dilakukan oleh masyarakat umum atau pelaku usaha dimana saja dan kapan saja,
2. Tersedianya sarana dan Prasarana yang mendukung terlaksananya pelayanan perizinan,
3. Kepekaan petugas pelayanan dalam memberikan pelayanan yang cepat, tepat dan transparan,

Diagram. 5

Persentase Capaian Realisasi Izin yang diterbitkan
DPMPTSP Kab. Luwu Timur dari Tahun 2017 s.d 2023



Kegiatan 2. Persentase Jumlah Pengaduan yang Ditindaklanjuti

Salah satu factor penting dalam penyelenggaraan Publik adalah pengaduan masyarakat, olehnya itu setiap penyelenggaraan public berkewajiban membentuk mekanisme pengaduan masyarakat terhadap pelaksanaan pelayanan, pengelolaan pengaduan masyarakat, informasi serta pengawasan internal dari seluruh bagian organisasi untuk bertanggung jawab atas ketidakmampuan, pelanggaran dan kegagalan penyelenggaraan pelayanan Publik.

Adapun mekanisme pengaduan masyarakat yang telah disediakan oleh DPMPTSP Kab. Luwu Timur meliputi tata cara sebagai berikut:

1. Pengaduan langsung, yaitu pengaduan yang datang langsung melalui petugas loket secara lisan/telepon dan secara tertulis (form pengaduan), SMS centre;
2. Pengaduan tidak langsung, yaitu pengaduan tertulis disampaikan melalui kotak saran/masukan.

Pengaduan yang dimaksud dalam indikator ini adalah pengaduan berupa komplain yang merupakan bentuk ketidakpuasan masyarakat terhadap pelayanan perizinan dan pelaksanaan izin-izin yang telah dikeluarkan oleh Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kab. Luwu Timur. Pada tahun 2023 ada 6 target pengaduan dan terealisasi sebanyak 8 pengaduan dan semuanya dapat difasilitasi dan ditindaklanjuti dalam penyelesaiannya.

Tabel. 25
Rekap Laporan Pengaduan Tahun 2023

NO	JENIS PENGADUAN	ISI PENGADUAN	TANGGAL TINDAK LANJUT	PELAKSANAAN	HASIL TINDAK LANJUT
1.	Pengaduan Ringan	Kesalahan Pengetikan Nama di Surat Izin Tenaga Kesehatan (an. Presti Andriani, AMD.Kep)	21 Januari 2023	Meregistrasi pengaduan dari pemohon	
				Mencermati dan menelaah hal-hal yang diadukan oleh pemohon	
				Menganalisa penyebab	
				Melakukan pengecekan rekomendasi tim teknis	Terdapat kesalahan direkomendasi yang dikeluarkan tim teknis
				melakukan koordinasi dengan tim teknis	Melakukan perbaikan Surat Izin Kesehatan dan menyerahkan ke pemohon
2.	Pengaduan Sedang	Warga Desa Balai Kembang sangat menyaoal kandang ayam (Tabloid SAR)	27 Maret 2023	Meregistrasi pengaduan dari pemohon	
				Mencermati dan menelaah hal-hal yang diadukan oleh pemohon	
				Menganalisa penyebab	
			28 Maret 2023	Melakukan peninjauan lapangan bersama Tim, teknis dari DLH	Terjadi miss komunikasi antara Pemerintahan Desa dan Kecamatan, sehingga kami tidak melanjutkan lagi pengaduan ini karena sudah bukan menjadi kewenangan kami.
3.	Pengaduan Berat	Adanya aduan masyarakat terkait bau limbah Pabrik Kelapa Sawit PT. Teguh Wira Pratama (Camat Angkona)	06 Juni 2023	Meregistrasi pengaduan dari pemohon	
				Mencermati dan menelaah hal-hal yang diadukan oleh pemohon	
				Menganalisa penyebab	
			07 Juni 2023	Mengikuti Pertemuan di Kantor Desa Watangpanua	Menghasilkan beberapa kesepakatan antara lain :

					Akan dilakukan peninjauan lokasi mana yang perlu ditindaklanjuti oleh pihak perusahaan Pihak Perusahaan akan membuat plan sebagai tanda masuk kedalam perusahaan Pihak perusahaan akan melakukan upaya untuk mengurangi bau yang terdampak pada masyarakat sekitar pabrik.
4.	Pengaduan Ringan	Kesalahan Pengetikan nama perusahaan di PKWT (an. Nurul, PT. Nusa Konstruksi Enjiniring)	22 Juni 2023	Meregistrasi pengaduan dari pemohon	
				Mencermati dan menelaah hal-hal yang diadukan oleh pemohon	
				Menganalisa penyebab	
				Melakukan pengecekan rekomendasi tim teknis	Terdapat kesalahan direkomendasi yang dikeluarkan tim teknis
				melakukan koordinasi dengan tim teknis	Melakukan perbaikan PKWT dan menyerahkan ke pemohon
5.	Pengaduan Ringan	Kesalahan pencantuman gelar pada Surat Izin Kesehatan (an. Yulia, A.Md.Keb)	20 Juli 2023	Meregistrasi pengaduan dari pemohon	
				Mencermati dan menelaah hal-hal yang diadukan oleh pemohon	
				Menganalisa penyebab	
				Melakukan pengecekan rekomendasi tim teknis	Rekomendasi Tim teknis sudah benar.
				Melakukan perbaikan	menyerahkan ke pemohon
6.	Pengaduan Ringan	Kesalahan pengetikan praktek kerja (SIK) an. Aisyah Ikmal, A.Md.KG	23 Agustus 2023	Meregistrasi pengaduan dari pemohon	
				Mencermati dan menelaah hal-hal yang diadukan oleh pemohon	
				Menganalisa penyebab	
				Melakukan pengecekan rekomendasi tim teknis	Rekomendasi Tim teknis sudah benar.

				Melakukan perbaikan	menyerahkan ke pemohon
7.	Pengaduan Ringan	Kesalahan pengetikan Nama (SIK-P) an. Heristan Sappu Pana, S.Kep,Ns	26 September 2023	Meregistrasi pengaduan dari pemohon	
				Mencermati dan menelaah hal-hal yang diadukan oleh pemohon	
				Menganalisa penyebab	
				Melakukan pengecekan rekomendasi tim teknis	Rekomendasi Tim teknis sudah benar.
				Melakukan perbaikan	menyerahkan ke pemohon
8.	Pengaduan Ringan	Kesalahan pengetikan titel pada nama (SIK-B) an. Risnah, S.Si.T	29 September 2023	Meregistrasi pengaduan dari pemohon	
				Mencermati dan menelaah hal-hal yang diadukan oleh pemohon	
				Menganalisa penyebab	
				Melakukan pengecekan rekomendasi tim teknis	Terdapat kesalahan direkomendasi yang dikeluarkan tim teknis
				melakukan koordinasi dengan tim teknis	Melakukan perbaikan PKWT dan menyerahkan ke pemohon

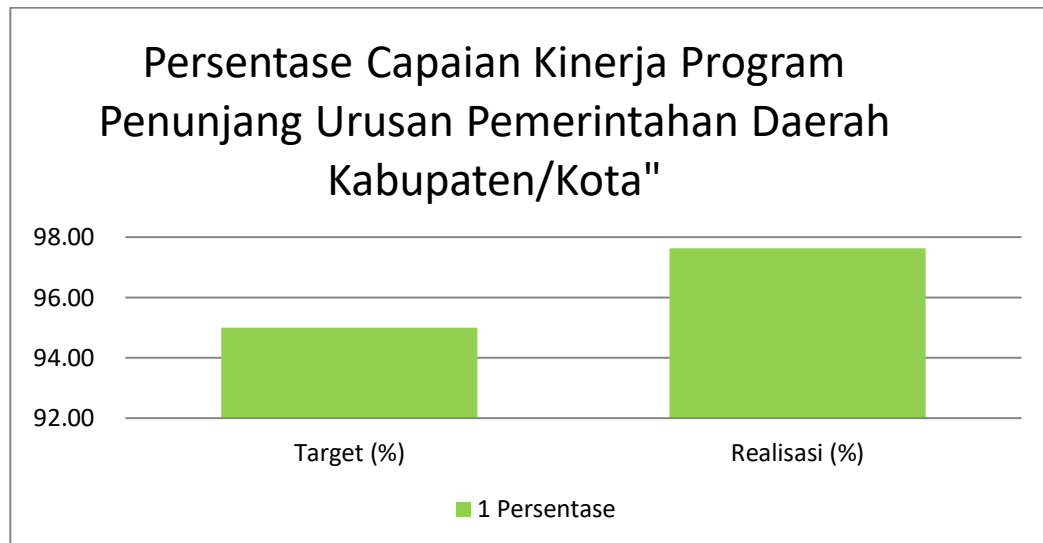
Sasaran Pendukung

Meningkatnya kualitas dan pencapaian kinerja penyelenggaraan urusan Penanaman Modal dan PTSP

Tabel. 26
Capaian Kinerja Sasaran 3 Tahun 2023

SASARAN	INDIKATOR KINERJA SASARAN	TARGET TAHUNAN	Realisasi 2023	CAPAIAN %
SASARAN 3: Meningkatnya kualitas dan pencapaian kinerja penyelenggaraan urusan Penanaman Modal dan PTSP	<i>Persentase capaian kinerja program Dinas Penanaman Modal dan pelayanan Terpadu Satu Pintu (%)</i>	96,00	98,90	103,02

Grafik.
Capaian Kinerja Sasaran Penunjang Tahun 2023



Tabel. 27
Capaian Indikator Kinerja Sasaran Pendukung

Sasaran Pendukung :	Meningkatnya kualitas dan pencapaian kinerja penyelenggaraan urusan perangkat daerah			Notifikasi
Indikator Kinerja Sasaran	Tahun 2023			
	Target	Realisasi	Capaian (%)	
Persentase Capaian Kinerja Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	96%	98,90%	103,02%	

Keterangan : ● Mencapai/Melampaui Target ; ● Belum Mencapai Target

Realisasi Indikator sasaran, yaitu nilai LAKIP Tahun 2023 masih belum terealisasi, karena belum dilakukan pengukuran oleh Inspektorat Kabupaten. Pada indikator ini ada 1 (satu) program yang didukung dengan 8 (delapan) kegiatan, seperti diuraikan pada Tabel 28.

PROGRAM/ KEGIATAN							SUB KEGIATAN							KET
URAIAN	INDIKATOR KINERJA	SATUA N	TARGET		REALISA SI	% CAPAIA N	URAIAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET		REALI SASI	% CAPAIAN	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH AN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Persentase rata-rata kinerja pelayanan administrasi perkantoran terpenuhi	%	TW I	25	21,34	85,36								
			TW II	25	20,00	80,00								
			TW III	25	23,40	93,60								
			TW IV	25	24	96,00								
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase barang milik daerah pada perangkat daerah yang di tatau sahkan	%	TW I	25	25,00	100,00	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah laporan penatausahaa n barang milik daerah SKPD yang disusun tepat waktu	Dok	TW I	1	1	100,00	
			TW II	25	25,00	100,00				TW II	1	1	100,00	
			TW III	25	25,00	100,00				TW III	1	1	100,00	
			TW IV	25						TW IV	1	1	100,00	
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase rata-rata capaian kinerja administrasi kepegawaian perangkat daerah	%	TW I	25	0,00	0,00	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah laporan data administrasi kepegawaian yang di mutakhirkan	Dok	TW I	1	1	100,00	
			TW II	25	0,00	0,00				TW II	1	1	100,00	
			TW III	25						TW III	1	1	100,00	
			TW IV	25						TW IV	1	1	100,00	

Laporan Kinerja 2023

							Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah pegawai yang mengikuti bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Org	TW I	2	4	200,00	
										TW II	4	4	100,00	
										TW III	4	4	100,00	
										TW IV	5	5	100,00	
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase rata-rata capaian kinerja administrasi umum perangkat daerah	%	TW I	25	25,00	100,00	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	Jenis	TW I	3	3	100,00	
			TW II	25	23,00	92,00				TW II	3	3	100,00	
			TW III	25	22,00	88,00				TW III	5	4	80,00	
			TW IV	25						TW IV	5	5	100,00	
							Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah bahan logistik kantor yang disediakan	Jenis	TW I	2	2	100,00	
										TW II	2	2	100,00	
										TW III	2	2	100,00	
										TW IV	2	2	100,00	
							Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	Jenis	TW I	4	4	100,00	
										TW II	4	4	100,00	

									TW III	4	4	100,00	
									TW IV	4	4	100,00	
						Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	Eksemplar	TW I	15	15	100,00	
									TW II	15	15	100,00	
									TW III	15	13	86,67	
									TW IV	15	17	113,33	
						Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah tamu yang difasilitasi kunjungannya	Org	TW I	30	59	196,67	
									TW II	40	50	125,00	
									TW III	40	0	0,00	
									TW IV	40	21	52,50	
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi SKPD yang diselenggarakan	Kali	TW I	60	87	145,00							
			TW II	90	52	57,78							
			TW III	80	89	111,25							
			TW IV	44	222	504,55							

Laporan Kinerja 2023

Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang diadakan	Unit	TW I	0	0	0	Pengadaan Mebel	Jumlah Mebel yang diadakan	Unit	TW I	0	0	0,00	
			TW II	100	0	0,00				TW II	0	0	0,00	
			TW III	0						TW III	0	0	0,00	
			TW IV	0						TW IV	1	1	100,00	
							Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan mesin Lainnya yang disediakan	Unit	TW I	0	0	0,00	
							TW II	0	0	0,00				
							TW III	0	0	0,00				
							TW IV	6	6	100,00				
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase rata-rata capaian kinerja penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	%	TW I	25	38	152	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah pelayanan surat menyurat yang disediakan	Surat	TW I	10 0	384	384,00	
			TW II	25	24	96				TW II	20 0	219	109,50	
			TW III	25						TW III	40 0	100	25,00	
			TW IV	25						TW IV	30 0	594	198	
							Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik	Jumlah rekening bulanan jasa komunikasi, SDA dan listrik yang	Rek	TW I	15	15	100,00	
							TW II	15	15	100,00				

								terbayarkan		TW III	15	13	86,67										
										TW IV	15	17	113,33										
										Org	TW I	4	4		100,00								
											TW II	4	4		100,00								
											TW III	4	4		100,00								
											TW IV	4	4		100,00								
																		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah tenaga jasa pelayanan umum				
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang dipelihara	Unit	TW I	23	8	34,78	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya		Unit	TW I	9	3	33,33									
			TW II	25	20	80,00					TW II	9	6	66,67									
			TW III	25							TW III	9	5	56									
			TW IV	16							TW IV	9	9	100									
								Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara		Unit	TW I	5	3	60,00								
												TW II	10	8	80,00								
												TW III	20	17	85,00								
												TW IV	12	19	158,33								

Laporan Kinerja 2023

							Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor yang dipelihara	Unit	TW I	0	0	0,00	
										TW II	1	0	0,00	
										TW III	0	0	0,00	
										TW IV	0	1	100,00	
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase rata-rata capaian kinerja administrasi keuangan perangkat daerah	%	TW I	25	24	96,00	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang gaji dan tunjangan terbayarkan	Org	TW I	21	18	85,71	
			TW II	25	24	96,00				TW II	21	18	85,71	
			TW III	25						TW III	21	18	85,71	
			TW IV	25						TW IV	20	18	90,00	
							Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulana/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah laporan keuangan perangkat daerah yang disusun tepat waktu	Dok	TW I	3	3	100,00	
										TW II	4	4	100,00	
										TW III	5	5	100	
										TW IV	6	6	100	
Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Jumlah realisasi PAD perangkat daerah	Rp	TW I	-	-	0,00	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah laporan pengelolaan retribusi daerah yang disusun tepat	Dok	TW I	1	0	0,00	Dipin dahka n ke PU
			TW II	625.000. 000	-	0,00				TW II	1	0	0,00	

			TW III	875.000.000	-			waktu		TW III	1	0	0	
			TW IV	#####						TW IV	1	0	0	
Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang disusun tepat waktu	Dok	TW I	2	2	100,00	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan yang disusun tepat waktu	Dok	TW I	1	1	100	
			TW II	5	5	100,00				TW II	1	1	100	
			TW III	7	7	100,00				TW III	0	0	0	
			TW IV	3						TW IV	0	0	0	
							Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA SKPD yang disusun tepat waktu	Dok	TW I	0	0	0	
										TW II	1	1	100	
										TW III	1	1	100	
										TW IV	0	0	0	
							Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah dokumen DPA SKPD yang disusun tepat waktu	Dok	TW I	1	1	0	
										TW II	0	0	0	
										TW III	1	1	100	
										TW IV	0	0	0	

						Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan kinerja perangkat daerah yang disusun tepat waktu	Dok	TW I	1	1	100	
									TW II	2	2	100	
									TW III	4	4	100	
									TW IV	3	3	100	

1. Perbandingan Target Tahun 2023 dan Realisasi Tahun 2023

➤ **Analisis Capaian kinerja sasaran sebagai berikut :**

Indikator kinerja sasaran penunjang adalah Persentase Capaian Kinerja Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, dengan **formulasi indikator** yang digunakan untuk menghitung capaian target adalah **“Jumlah capaian kinerja program dibagi target sasaran dikali seratus”**.

Target Indikator sasaran penunjang pada TA. 2023 adalah 96% dan realisasi 98,90% dengan persentase capaian kinerja 103,02%. Persentase capaian kinerja melebihi dari target karena beberapa kegiatan yang mendukung capaian program, realisasinya > 100% sehingga bila diakumulasi maka akan menutupi kegiatan yang realisasinya <100%.

Adapun program, kegiatan dan sub kegiatan yang mendukung sasaran ini adalah sebagai berikut :

- Penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota
1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
 - Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD
 3. Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
 - Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
 4. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
 - Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan
 5. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor
 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

- Fasilitas Kunjungan Tamu
- Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
- 6. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 - Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
- 7. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat
 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- 8. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

❖ **Hambatan/Kendala**

Dalam pencapaian sasaran tersebut, terdapat beberapa hambatan atau kendala yang dihadapi yaitu :

- Adanya penyesuaian penggunaan aplikasi SIPD untuk penatausahaan keuangan yang berpengaruh terdapat penyerapan anggaran
- Keterlambatan proses pengadaan barang dan jasa
- Keterlambatan penetapan pejabat pengadaan barang dan jasa
- Adanya sitem belanja barang makan minum dan Alat tulis kantor menggunakan belanja e-katalog di ULP.
- Terdapat sub kegiatan yang sifatnya disediakan, yang penggunaan anggarannya disesuaikan dengan kebutuhan

❖ **Solusi**

Untuk menjawab permasalahan atau kendala yang dihadapi maka langkah-langkah yang ditempuh adalah :

- Untuk segera melakukan penatausahaan keuangan bilamana aplikasi telah siap digunakan
- Untuk segera menetapkan pejabat pengadaan barang dan jasa
- Melakukan koordinasi pejabat pengadaan dan PPK terkait percepatan proses pengadaan barang dan jasa

- Melakukan persuratan ke BKPSDM terkait kebutuhan pegawai
- Mencermati rekening belanja untuk sub kegiatan yang sifatnya disediakan

❖ Efisiensi Anggaran

Dalam pencapaian sasaran pendukung DPMPTSP, dilakukan beberapa efisiensi anggaran yaitu :

- Efisiensi anggaran pada belanja modal pengadaan peralatan dan mesin lainnya dengan memaksimalkan peralatan yang ada.
- Terdapat harga satuan untuk belanja pemeliharaan peralatan dan mesin yang bisa digunakan untuk membiayai lebih dari 1 unit peralatan kantor.
- Efisiensi belanja listrik, telepon dan air kantor yaitu, untuk biaya WIFI Kantor, difasilitasi oleh Dinas KOMINFO

➤ Efisiensi Sumber Daya

- Tidak adanya tenaga ASN pada jabatan pelaksana yang dapat membantu pejabat struktural sehingga untuk mengakomodir semua pelaksanaan tugas, dilakukan rangkap jabatan sebagai pelaksana harian dan memaksimalkan upah jasa dalam membantu pelaksanaan tugas ASN.
- Memaksimalkan peralatan yang ada untuk mendukung pelaksanaan tugas ASN.

➤ Analisis Efisiensi Sumber Daya

Tabel. 29
Pencapaian Kinerja dan Anggaran

Sasaran Pendukung	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran		
		Target	Realisasi	Capaian (%)	Alokasi	Realisasi	Capaian (%)
1	2	3	4	5	6	7	8
Program Penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	96%	98,90%	103,02%	3.586.287.495,-,-	3.456.417.427,-	96,38%

Tabel. 30
Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Sasaran Pendukung	Indikator Kinerja	% Capaian Kinerja	% Penyerapan Anggaran	% Tingkat Efisiensi Biaya
1	2	3	4	5
Meningkatnya kualitas dan pencapaian kinerja penyelenggaraan urusan perangkat daerah	Persentase Capaian Kinerja Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	102,76%	98,42%	1,58%

Pencapaian sasaran pendukung Meningkatkan kualitas dan pencapaian kinerja penyelenggaraan urusan perangkat daerah sebesar 102,76% dengan persentase penyerapan anggaran sebesar 98,42%, sehingga persentase efisiensi biaya adalah 1,58%. Adapun Persentase efisiensi biaya dapat hitung dengan menggunakan rumus :

$$\text{Persentase efiesinesi biaya} = 100\% - \left[\frac{\text{Realisasi Biaya}}{\text{Target Biaya}} \times 100\% \right]$$

2. Perbandingan antara target dan realisasi TA. 2023 dengan Tahun sebelumnya (2022)

Adapun perbandingan antara target dan realisasi dengan tahun-tahun sebelumnya dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel. 31
Perbandingan Target dan Realisasi dengan Triwulan Sebelumnya

Sasaran Pendukung :	Meningkatnya kualitas dan pencapaian kinerja penyelenggaraan urusan perangkat daerah						Target Tahun 2023
Indikator Kinerja Sasaran	TA. 2023			TA. 2022			
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	
Persentase Capaian Kinerja Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	96 %	98,90 %	103,02 %	95 %	97,63 %	102,76 %	100%

❖ **Analisis Capaian kinerja sasaran sebagai berikut :**

Berdasarkan tabel diatas, maka dapat dilihat perbandingan capaian kinerja Tahun 2023 dengan TA. 2022 yang mengalami peningkatan. Peningkatan tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu :

1. Capaian kinerja beberapa sub kegiatan melebihi dari target yang direncanakan
2. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi program, kegiatan dan sub kegiatan secara periodik.
3. Melakukan evaluasi/monitoring terhadap pencapaian target Rencana Aksi Kinerja dan Perjanjian Kinerja

3. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2023 dengan Target Jangka Menengah

Tabel. 32
Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2023 Terhadap Target Jangka Menengah
(2021 - 2026)

Sasaran Pendukung :	Meningkatnya kualitas dan pencapaian kinerja penyelenggaraan urusan perangkat daerah		Target Akhir Renstra 2026	% Capaian s/d 2023 terhadap target akhir Renstra 2026
Indikator Kinerja Sasaran	Realisasi			
	Tahun 2023	rata-rata realisasi sampai dengan tahun 2023		
Persentase Capaian Kinerja Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	98,90%	98,90%	100%	98,90%

Capaian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Pendukung

Tabel. 33
Capaian Indikator Kinerja Program Pendukung

N o	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Sasaran Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Target 2023	Target s.d Tahun 2023	Realisasi TW 1V	Capaian
I.	Program Penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	Terciptanya sistem pelayanan administrasi perkantoran yang memadai	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	96%	96%	98,90%	103,02%

1.	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersedianya dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang tersusun tepat waktu	Persentase penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran & evaluasi tepat waktu	100%	100%	100%	100%
a.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersedianya dokumen perencanaan perangkat daerah yang disusun tepat waktu	Jumlah dokumen perencanaan yang disusun tepat waktu	2 Dok	2 Dok	2 Dok	100%
b.	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Tersedianya dokumen RKA-SKPD yang disusun tepat waktu	Jumlah dokumen RKA-SKPD yang disusun tepat waktu	2 Dok	2 Dok	2 Dok	100%
c.	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Tersedianya dokumen DPA-SKPD yang disusun tepat waktu	Jumlah dokumen DPA-SKPD yang disusun tepat waktu	2 Dok	1 Dok	1 Dok	100%
d.	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersedianya laporan kinerja perangkat daerah yang disusun tepat waktu	Jumlah laporan kinerja perangkat daerah yang disusun tepat waktu	10 Dok	10 Dok	10 Dok	100%
2.	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersedianya laporan keuangan perangkat daerah	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Tepat Waktu	100%	100%	87,50%	87,50%
a.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Terbayarnya gaji dan tunjangan ASN	Jumlah ASN yang terbayarkan gaji dan tunjangannya	21 Org	21 Org	19 Org	90,47%
b.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Tersusunnya laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran dan akhir tahun dengan baik	Jumlah laporan keuangan perangkat daerah yang disusun tepat waktu	18 Dok	18 Dok	18 Dok	100%
3.	Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Terlaksananya administrasi dan penatausahaan Barang Milik Daerah pada perangkat daerah	Persentase BMD yang diadministrasi sesuai standar	100%	100%	100%	100%
a.	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Terlaksananya kegiatan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	Jumlah laporan penatausahaan BMD SKPD yang disusun tepat waktu	4 Dok	4 Dok	4 Dok	100%
4.	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Tersedianya administrasi kepegawaian perangkat daerah	Persentase Pegawai Perangkat Daerah yang dilayani	100%	100%	100%	100%

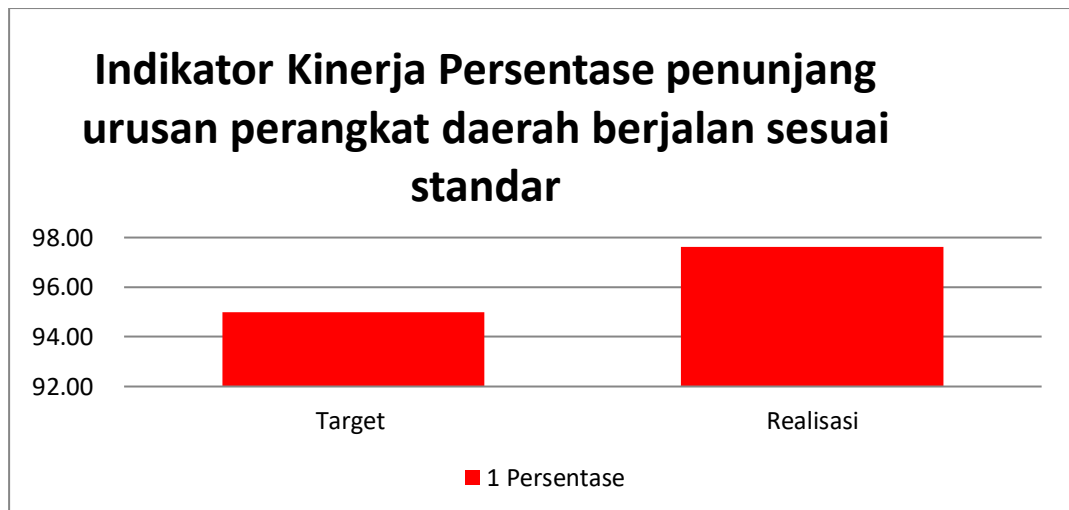
a.	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Terlaksananya peningkatan kapasitas bagi aparatur	Jumlah pegawai yang mengikuti bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	15 Org	16 Org	17 Org	113,33%
b.	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Tersedianya data kepegawaian perangkat daerah	Jumlah Dokumen pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	12 Dok	12 Dok	12 Dok	100%
5.	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya administrasi umum perangkat daerah	Persentase administrasi umum Perangkat Daerah berjalan sesuai standar	100%	100%	95,00%	95,00%
a.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan untuk bangunan kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	15 Jenis	15 Jenis	15 Jenis	100%
b.	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya bahan logistik untuk kelancaran pelayanan administrasi perkantoran	Jumlah Bahan Logistik Kantor yang disediakan	2 Jenis	2 Jenis	2 Jenis	100%
c.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan untuk kebutuhan kantor	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	4 Jenis	4 Jenis	4 Jenis	100%
d.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan	60 Expl	60 Expl	60 Expl	100%
e.	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Terfasilitasinya makanan dan minuman untuk tamu	Jumlah tamu yang difasilitasi kunjungannya	150 Org	150 Org	130 Org	86,66%
f.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya kegiatan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD yang diselenggarakan	450 Kali	450 Kali	450 Kali	100%
6.	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terpenuhinya kebutuhan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	Persentase BMD-Perangkat Daerah penunjang yang terpenuhi	100%	0%	0%	0%
a.	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tersedianya peralatan/mesin lainnya untuk	Jumlah Peralatan/Mesin Lainnya yang	8 Unit	8 Unit	8 Unit	100%

		kebutuhan kantor	diadakan				
b.	Pengadaan Mebel	Tersedianya gedung kantor atau bangunan lainnya untuk penunjang urusan perkantoran	Jumlah Mebel yang diadakan	1 Unit	1 Unit	1 Unit	100%
7.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya jasa pendukung dan sarana penunjang urusan pemerintahan daerah	Persentase jasa penunjang urusan yang tersedia	100%	100%	94,72%	94,72%
a.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Teradministrasinya surat masuk dan surat keluar dengan baik	Jumlah surat masuk dan keluar yang diagenda	1000 Surat	1297 Surat	198 Surat	129,7%
b.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terbayarnya rekening bulanan telepon, air dan listrik kantor demi kelancaran pelayanan administrasi perkantoran	Jumlah rekening bulanan telepon, air dan listrik kantor yang terbayarkan	60 Rek	60 Rek	60 Rek	100%
c.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya jasa tenaga pelayanan umum kantor untuk penunjang urusan perkantoran	Jumlah jasa tenaga pelayanan umum kantor yang disediakan	4 Org	4 Org	4 Org	100%
8.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang siap pakai	Persentase BMD penunjang urusan yang terpelihara	100%	100%	100%	100%
a.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional dengan baik	Jumlah kendaraan dinas yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	9 Unit	9 Unit	9 Unit	100%
b.	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terpeliharanya peralatan dan mesin lainnya dengan baik	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	47 Unit	47 Unit	47 Unit	100%
c.	Pemeliharaan/R ehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terpeliharanya gedung kantor dan bangunan lainnya dengan baik	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	1 Unit	1 Unit	1 Unit	100%

❖ **Analisis Program/Kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja Sasaran**

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota (outcome)

Grafik.
Perbandingan Target dan realisasi TA. 2023



Indikator Program adalah Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar dengan **formulasi : jumlah capaian kinerja seluruh kegiatan dibagi jumlah seluruh kegiatan dikali seratus**. Target 96% dan realisasi 98,90% dengan capaian kinerja 103,02%, dan menyerap anggaran sebesar 97,96%. Capaian kinerja program yang melebihi target karena beberapa kegiatan capaiannya > 100% sehingga bila diakumulasi maka akan menutupi kegiatan yang realisasinya <100%. Pencapaian Kinerja Program didukung oleh 8 kegiatan dan 23 sub kegiatan yaitu :

1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Indikator kinerja kegiatan adalah Persentase penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran & evaluasi tepat waktu, dengan **Formulasi : Jumlah capaian kinerja seluruh sub kegiatan dibagi jumlah seluruh sub kegiatan dikali seratus**. Target 100% dan realisasi 100%.

2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Indikator kegiatan adalah persentase administrasi keuangan yang terselenggara dengan baik, dengan **Formulasi : Jumlah capaian kinerja seluruh sub kegiatan dibagi jumlah seluruh sub kegiatan dikali seratus**. Target 100% dan realisasi 96,4% dengan persentase capaian kinerja 95%. Capaian kinerja yang tidak sesuai target karena dari 2 sub kegiatan yang dilaksanakan, salah satu sub kegiatan yaitu Penyediaan Gaji dan Tunjangan realisasinya hanya 90%, yang diakibatkan adanya jabatan Pelaksana (Pejabat Pemeriksa Keuangan) yang belum terisi. Pencapaian kinerja kegiatan didukung oleh :

- **Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN**

Indikator kinerja sub kegiatan adalah Jumlah ASN yang gaji dan tunjangan terbayarkan, target 21 org dan realisasi 19 org dengan persentase capaian kinerja 90 %. Hal ini disebabkan dikarenakan 1 orang pensiun pada bulan Juli dan Sekretaris Dinas kosong selama 3 bulan.

- **Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD**

Indikator kinerja sub kegiatan adalah Jumlah dokumen laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran SKPD yang disusun Tepat Waktu, target pada TA. 2023 sebanyak 18 dokumen dan realisasi 18 dokumen (100%) yaitu Laporan Keuangan Tahun 2022 1 dok, Laporan Triwulanan 1 dok, Laporan Bulanan Bendahara 3 dok. Disediakan anggaran kas pada triwulan 4 sebesar Rp 103.154.435 terealisasi sebesar Rp 101.647.500 atau sebesar 98,54%.

3. Kegiatan Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah

Indikator kinerja kegiatan adalah persentase BMD yang diadministrasikan sesuai standar dengan **Formulasi : Jumlah capaian kinerja seluruh sub kegiatan dibagi jumlah seluruh sub kegiatan dikali seratus**. Target 100% dan realisasi 100%. Pencapaian kinerja kegiatan didukung oleh :

- **Sub Kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD**

Indikator kinerja sub kegiatan adalah Jumlah dokumen laporan penatausahaan barang milik daerah pada SKPD yang disusun, dengan target pada TA. 2023 sebanyak 4 dokumen dan realisasi 4 dokumen (100%). Dokumen yang disusun adalah Laporan penatausahaan BMD.

Disediakan anggaran kas pada triwulan 4 sebesar Rp 10.623.710, terealisasi sebesar Rp. 10.612.000 atau sebesar 99,89%.

4. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

Indikator kinerja kegiatan adalah Persentase Rata-rata Capaian kinerja Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah, dengan **Formulasi : *Jumlah capaian kinerja seluruh sub kegiatan dibagi jumlah seluruh sub kegiatan dikali seratus.*** Target 100% dan realisasi 100% dengan persentase capaian kinerja 100%. Pencapaian kinerja kegiatan didukung oleh :

- **Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan**

Indikator kinerja sub kegiatan adalah Jumlah ASN yang mengikuti bimbingan teknis implementasi peraturan perundang - undangan, dengan target pada TA. 2023 sebanyak 15 org dan realisasi 17 orang (113,33%) yaitu Bimtek anggaran 1 orang, Bimtek LKPJ/LPPD 1 orang, Bimtek Arsip 3 orang. Penggunaan anggaran BIMTEK disesuaikan undangan pemanggilan peserta. Disediakan anggaran sebesar Rp 17.620.000, Realisasi keuangan sebesar Rp 17.620.000,- atau sebesar 98,30%.

5. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

Indikator kinerja kegiatan adalah Persentase Rata- Rata Capaian Kinerja administrasi umum Perangkat Daerah, dengan **Formulasi : *Jumlah capaian kinerja seluruh sub kegiatan dibagi jumlah seluruh sub kegiatan dikali seratus.*** Target 100% dan realisasi 95,00% dengan persentase capaian kinerja 98,00%. Capaian kinerja kurang dari target karena terdapat 1 sub kegiatan yang tidak terealisasi. Dan disediakan anggaran sebesar Rp Rp 458.512.700,- terealisasi sebesar Rp 450.831.544,- atau sebesar 98,32%.

6. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Indikator kinerja kegiatan adalah Persentase BMD-Perangkat Daerah penunjang yang terpenuhi, dengan **Formulasi : *Jumlah capaian kinerja seluruh sub kegiatan dibagi jumlah seluruh sub kegiatan dikali seratus.*** Dan berdasarkan anggaran kas, pelaksanaan sub kegiatan dilakukan pada Triwulan II dan III TA. 2023. Pencapaian kinerja kegiatan didukung oleh :

- **Sub Kegiatan Pengadaan Mebel** terealisasi 1 unit atau sebesar 100%
- **Sub kegiatan Pengadaaan Peralatan dan Mesin** terealisasi 8unit atau sebesar 100% terdiri dari: pengadaan Mesin Babat rumput, Mesin Scanner

2 unit, Printer 1 Unit, laptop 1 unit, Mesin Antrian Pelayanan 1 unit, Dispenser 2 unit.

7. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Indikator kinerja kegiatan adalah Persentase Rata-Rata Capaian Kinerja jasa penunjang urusan pemerintahan daerah, dengan **Formulasi : Jumlah capaian kinerja seluruh sub kegiatan dibagi jumlah seluruh sub kegiatan dikali seratus**. Target 100% dan realisasi 100% dengan persentase capaian kinerja 100%. Pencapaian kinerja kegiatan didukung oleh :

- **Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat**

Indikator kinerja sub kegiatan adalah Jumlah surat masuk dan keluar yang diadministrasikan, target TA. 2023 sebanyak 1000 surat dan terealisasi 1.297 surat dengan persentase capaian kinerja 129%.

- **Sub Kegiatan Penyediaan Jasa komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik**

Indikator kinerja sub kegiatan adalah jumlah rekening telepon, listrik dan air yang terbayarkan, target pada TA. 2023 sebanyak 60 rekening dan realisasi 60 rekening, terdiri dari Listrik DPMPTSP 12 rek, rek Air kantor 12 rek, kartu halo 12 rek, TV Kabel 12 bulan dengan persentase capaian kinerja 100%.

- **Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor**

Indikator kinerja sub kegiatan adalah jumlah jasa tenaga pelayanan umum kantor yang dibayarkan, target 4 orang setiap triwulan dan realisasi 4 orang (100%) yaitu terbayarnya honor upah jasa cleaning service dan tenaga security.

8. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Indikator kinerja kegiatan adalah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan **Formulasi : Jumlah capaian kinerja seluruh sub kegiatan dibagi jumlah seluruh sub kegiatan dikali seratus**. Target 100% dan realisasi 100% dengan persentase capaian kinerja 100%. Capaian kinerja tidak sesuai dengan target karena terdapat beberapa peralatan kantor dan peralatan bencana yang disediakan anggaran

pemeliharaannya, masih dalam kondisi baik. Sehingga penggunaan anggaran disesuaikan dengan kondisi peralatan.

3.2 Realisasi Anggaran

Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang telah digunakan serta analisis atas efisiensi penggunaan sumberdaya untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.

Anggaran APBD untuk Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan terpadu Satu Pintu Kabupaten Luwu Timur tahun 2023 adalah sebesar sebesar **Rp. 4.756.588.125,-** (*Empat Milyar Tujuh ratus Lima Puluh Enam Juta Lima Ratus Delapan Puluh Delapan Ribu Seratus Dua Puluh Lima Rupiah*), terdiri dari belanja pegawai **Rp 2.461.491.163,-** belanja barang dan jasa **Rp. 2.162.096.962,-** dan belanja modal **Rp 133.000.000,-**. Anggaran tersebut digunakan untuk membiayai 6 program, 13 kegiatan serta 32 sub kegiatan. Adapun target anggaran pada Tahun Anggaran 2023 dan realisasi dapat dilihat pada grafik berikut ini :

Grafik 30. Perbandingan Realisasi Anggaran TA. 2023 dan TA. 2022



Tabel. 34
Realisasi Anggaran Berdasarkan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2023

No	PROGRAM/ KEGIATAN	JUMLAH ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN S.D 31 Desember 2023		TOTAL SISA ANGGARAN	
			(Rp)	(%)	(Rp)	(%)
1	2	4	6	7(6/5*100)	10 (4-6)	11 (10/4*100)
A.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.586.287.495,00	3.456.417.427,00	96,38	129.870.068,00	3,62
01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	92.584.265,00	91.945.530,00	99,31	638.735,00	0,69
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	44.408.000,00	44.176.630,00	99,48	231.370,00	0,52
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	3.379.100,00	3.242.400,00	95,95	136.700,00	4,05
	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	3.908.665,00	3.782.165,00	96,76	126.500,00	3,24
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	40.888.500,00	40.744.335,00	99,65	144.165,00	0,35
02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.565.854.603,00	2.460.939.459,00	95,91	104.915.144,00	4,09
	Penyediaan gaji dan Tunjangan ASN	2.417.691.163,00	2.316.033.969,00	95,80	101.657.194,00	4,20
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	148.163.440,00	144.905.490,00	97,80	3.257.950,00	2,20
03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	16.421.981,00	13.499.800,00	82,21	2.922.181,00	17,79
	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	16.421.981,00	13.499.800,00	82,21	2.922.181,00	17,79
04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	93.510.000,00	91.489.149,00	97,84	2.020.851,00	2,16
	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	17.620.000,00	17.320.000,00	98,30	300.000,00	1,70
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	75.890.000,00	74.169.149,00	97,73	1.720.851,00	2,27
06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	458.512.700,00	450.831.544,00	98,32	7.681.156,00	1,68
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2.500.000,00	2.500.000,00	100,00	0,00	0,00
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	3.960.700,00	3.954.650,00	99,85	6.050,00	0,15
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	10.675.000,00	10.462.500,00	98,01	212.500,00	1,99
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	7.500.000,00	6.720.000,00	89,60	780.000,00	10,40
07	Fasilitasi Kunjungan Tamu	10.900.000,00	8.705.000,00	79,86	2.195.000,00	20,14
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	422.977.000,00	418.489.394,00	98,94	4.487.606,00	1,06

08	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	83.000.000,00	82.000.000,00	98,80	1.000.000,00	1,20
	Pengadaan mebel	7.000.000,00	7.000.000,00	100,00	0,00	0,00
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	76.000.000,00	75.000.000,00	98,68	1.000.000,00	1,32
09	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	149.491.146,00	140.692.699,00	94,11	8.798.447,00	5,89
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	24.200.570,00	23.717.365,00	98,00	483.205,00	2,00
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	48.490.576,00	40.575.334,00	83,68	7.915.242,00	16,32
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	76.800.000,00	76.400.000,00	99,48	400.000,00	0,52
10	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	126.912.800,00	125.019.246,00	98,51	1.893.554,00	1,49
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	45.650.000,00	44.228.700,00	96,89	1.421.300,00	3,11
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	18.150.000,00	18.150.000,00	100,00	0,00	0,00
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	63.112.800,00	62.640.546,00	99,25	472.254,00	0,75
B.	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	161.694.290,00	157.140.624,00	97,18	4.553.666,00	2,82
	Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	161.694.290,00	157.140.624,00	97,18	4.553.666,00	2,82
1.	Penetapan Kebijakan Daerah mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan kemudahan Penanaman Modal	119.560.000,00	117.533.574,00	98,31	2.026.426,00	1,69
2.	Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	42.134.290,00	39.607.050,00	94,00	2.527.240,00	6,00
C.	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	180.998.490,00	87.051.940,00	48,10	93.946.550,00	51,90
	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	180.998.490,00	87.051.940,00	48,10	93.946.550,00	51,90
1.	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal	22.638.490,00	15.785.000,00	69,73	6.853.490,00	30,27
2.	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	158.360.000,00	71.266.940,00	45,00	87.093.060,00	55,00
D.	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	333.108.350,00	322.192.860,00	96,72	10.915.490,00	3,28
	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	333.108.350,00	322.192.860,00	96,72	10.915.490,00	3,28
1.	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	312.788.200,00	303.449.250,00	97,01	9.338.950,00	2,99
2.	Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	20.320.150,00	18.743.610,00	92,24	1.576.540,00	7,76
E.	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	469.500.000,00	400.591.291,00	85,32	68.908.709,00	14,68
	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	469.500.000,00	400.591.291,00	85,32	68.908.709,00	14,68
1.	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!

2.	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	366.105.500,00	302.148.946,00	82,53	63.956.554,00	17,47
3.	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	103.394.500,00	98.442.345,00	95,21	4.952.155,00	4,79
F.	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	24.999.500,00	19.144.690,00	76,58	5.854.810,00	23,42
	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	24.999.500,00	19.144.690,00	76,58	5.854.810,00	23,42
1.	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	24.999.500,00	19.144.690,00	76,58	5.854.810,00	23,42
TOTAL BELANJA		4.756.588.125,00	4.442.538.832,00	93,40	314.049.293,00	6,60

Tabel. 35

❖ **Permasalahan dan Solusi terkait Penyerapan Anggaran**

No		PERMASALAHAN TERKAIT PENCAPAIAN KINERJA (SECARA TEKNIS BAIK FAKTOR INTERNAL MAUPUN FAKTOR EKSTERNAL)	PERMASALAHAN TERKAIT REALISASI KEUANGAN	SOLUSI
1		3	4	5
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Indikator Jumlah dokumen perencanaan yang disusun tepat waktu dengan target 100 % target triwulan II, 25 % realisasi triwulan III 25 %, realisasi triwulan IV 25 %	Anggaran yang diminta pada triwulan 1 - IV sebesar Rp.77.244.735, realisasi Rp. 76.678.304 sisa anggaran Rp.566.431.	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	tercapai 3 dokumen	dari target keuangan Rp 41.698.010 terrealisasi Rp 41. 600.000,- atau sebesar 99,76%	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Tercapai 2 dokumen	dari target keuangan Rp 3.414.860 terrealisasi Rp 3.284.860,- atau sebesar 96,19%	
	Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD	Tercapai 2 dokumen	Dari target keuangan Rp 4.162.965 terrealisasi Rp 3.944.554,- atau sebesar 94,75%	
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tercapai 10 dokumen	Dari target keuangan Rp 27.968.900 terrealisasi Rp 27.849.000,- atau sebesar 99,57%	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	indikator Persentase administrasi keuangan yang terselenggara dengan baik dengan target keseluruhan 100% tercapai	Anggaran yang diminta pada triwulan 1 - IV sebesar Rp.2.538.049.438 realisasi Rp. 2.508.021.591 (98,82%) sisa anggaran Rp. 30.027.847 .	
	Penyediaan gaji dan Tunjangan ASN	Indikator Jumlah ASN yang gaji dan Tunjangan terbayarkan target kinerja 21 orang target triwulan IV 21 orang realisasi 20 Orang	sisa anggaran bersifat persediaan.	

	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	tercapai 18 dokumen		
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	indikator Persentase administrasi milik Daerah yang terselenggara dengan baik dengan target keseluruhan 100% tercapai target	Anggaran yang diminta pada triwulan 1 - IV sebesar Rp.16.781.981 realisasi Rp. 14.720.000 (87,712%) sisa anggaran Rp. 2.061.981 .	
	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Capai target		
	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah			
	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Capai target		
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	indikator Persentase administrasi milik Daerah yang terselenggara dengan baik dengan target keseluruhan 100% tercapai target	Anggaran yang diminta pada triwulan I - III sebesar Rp.68.185.956,- realisasi 38.355.000 sisa anggaran kas 29.830.956 dari sisa anggaran sub kegiatan Pendataan dan pengolahan Administrasi Kepegawaian sebesar Rp.4.640.000,- dan Sub Kegiatan Bimbingan Teknis sebesar Rp. 33.715.000,-	
	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Capai Target dan berdasarkan Kebutuhan pegawai	terealisasi 99,26%	
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Bimbingan Teknis bagi ASN TW1: tercapai 5 orang (Milda, Iksan, Ayub Kombong, Idris, Joni), TW2: tercapai 3 orang (Idris, Hariyadi, Fahmi), TW3: tercapai 3 orang (Fahmi, Andi Rajuni, Amiruddin); TW4: tercapai 5 orang (Andi Habil, Joni, Nerty, Ichsan, Ondo ira)	terealisasi 97,87%	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah			
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Capai Target	terealisasi 99,98%	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Rumah Tangga	Pengadaan dihapuskan karena adanya pengurangan anggaran pada perubahan 2022	-	
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Direalisasikan pada Tw.3	Anggaran yang disediakan sebesar Rp 3.000.000 dan terealisasi Rp 3.000.000,- (100%)	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Capai Target	terealisasi 99,68%	
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Capai Target	terealisasi 99,99%	
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Capai Target	terealisasi 100%	
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Capai Target	terealisasi 100%	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Capai Target	terealisasi 99,92%	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			

	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pengadaan dihapuskan karena adanya pengurangan anggaran pada perubahan 2022	-	
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya dilaksanakan pada Triwulan II sesuai target anggaran kas dan rencana aksi	Anggaran yang disediakan sebesar Rp. 7.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 6.982.000 atau sebesar 99,74%	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	capai target	terealisasi 74,31%	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	capai target	terealisasi 100%	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Capai Target		
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Capai Target		
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Capai Target , sudah direalisasikan pada TW.2		
	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Indikator kinerja Meningkatnya Jumlah Investor PMA dan PMDN yang berskala Nasional target 33 perusahaan tercapai 30 perusahaan atau sebesar 90%. Hal ini disebabkan karena belum adanya regulasi baik Perda/Perbup terkait pemberian insentif investasi, sehingga berdampak pada kurangnya minat investasi Perusahaan-perusahaan.	terealisasi 97,56 %	
	Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Indikator kegiatan pada Tw.4 tercapai sebesar 25% dengan target 25% atau terealisasi sebesar 100%		
	Penetapan Kebijakan Daerah mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan kemudahan Penanaman Modal	Tercapai 2 Perda	terealisasi 99,97%	
	Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Tercapai 2 kegiatan	terealisasi 99,72%	
	Pembuatan Peta Potensi investasi kabupaten/Kota	tercapai	terealisasi 94,32 %	
	Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	tercapai 1 peta potensi	terealisasi 94,32 % (karena ada sisa penawaran dari pihak ke3)	
	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Realisasi Investasi belum terkumpul secara total karena adanya kendala pada aplikasi LKPM dari Pusat	terealisasi 98,45%	

	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Target MoU pada Tw.3 sebesar 2, tetapi sudah tercapai pada Tw.2 sebanyak 5 MoU atau sebesar 100%	terrealisasi 98,45%	
01	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal	capai target	Terealisasi 95%	
02	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	capai target	Terealisasi 98,92%	
	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Target Kinerja berupa persentase ketepatan waktu penyelesaian izin sesuai SOP sebesar 72% dan terealisasi sebesar 75,91%. Karena izin yang terbit sesuai SOP sebanyak 1.270 izin dan total izin yang terbit sebanyak 1.673 izin		
	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	99,84% dari target 100%.		
01	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Total izin terbit sampai Tw.4 tercapai 5.474 izin dari total target izin sebanyak 4.100 izin atau tercapai sebesar 133,51% , dan izin terbit sesuai kepemilikan izin perempuan sebanyak 2.635 izin	realisasi 98,90%	
02	Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	Target Pegaduan sebanyak 5 pengaduan dan tercapai 6 pengaduan atau sebesar 120%	realisasi 94,53%	
	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL		Anggaran yang diminta untuk triwulan I - III Rp. 378.248.141,- realisasi Rp.218.403.400 capaian 59,70% sisa anggaran kas Rp 159.844.741,-	
	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pelaku usaha yang taat melaporkan LKPM sebanyak 20%		
01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	Capai Target	Realisasi 90,12%. Belanja Sewa bangunan sifatnya di siapkan karena ada kegiatan yang pelaksanaannya di gabung. Sewa bangunan sifatnya disiapkan karena ada kegiatan.	
02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	Capai Target	realisasi anggaran sebesar 92,70%. Belanja Sewa bangunan sifatnya di siapkan karena ada kegiatan yang pelaksanaannya di gabung.	
03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	Capai Target	realisasi 99,90%	
	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	capai Target		

	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			
01	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	capai target	realisasi 97,55%	

Laporan Kinerja | 2023

Evaluasi Hasil RKPD Tahun 2023

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

No	Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target kinerja dan anggaran Renja PD Tahun Berjalan yang Dievaluasi (2022)		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi (2022)		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran Renja PD yang dievaluasi Tahun 2022 (%)		Keterangan
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		-																
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Persentase Penunjang urusan perangkat Daerah berjalan sesuai Standar	100	3.389.606.008	512.314,99	416.306.634											
	2,01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang disusun tepat waktu	17	77.244.735	3	5.195.000	4	21.600.000	4	15.174.000	4	34.709.304	17	76.678.304	100,00%	99,27%	
	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat	Jumlah dokumen perencanaan yang	3	41.698.010	1	4.395.000	1	13.815.000	1	5.110.000	-	18.280.000	3	41.600.000	100,00%	99,76%	

		Daerah	disusun tepat waktu														
	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA SKPD yang disusun tepat waktu	2	3.414.860	-	-	1	-		1.000.0 00	1	2.284.7 50	2	3.284.75 0	100,0 0%	96,19 %
	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah dokumen DPA SKPD yang disusun tepat waktu	2	4.162.965	1	800.000	-	-		1.000.0 00	1	2.144.5 54	2	3.944.55 4	100,0 0%	94,75 %
	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan kinerja perangkat daerah yang disusun tepat waktu	10	27.968.900	1	-	2	7.785.0 00	2	8.064.0 00	5	12.000. 000	10	27.849.0 00	100,0 0%	99,57 %
					77.244.735	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)										100,0 0%	99,27 %
						Predikat Kinerja										Sanga t Tinggi	Sanga t Tinggi
	2,02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentas e rata-rata capaian kinerja administra si keuangan perangkat daerah	100	2.538.049.43 8	21,50	284.619. 793	22,00	857.53 1.842	22,00	704.21 4.927	23,50	661.65 5.029	97	2.508.02 1.591	97,44 %	98,82 %
	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang gaji dan tunjangan ya terbayarka n	21	2.434.895.00 3	20	273.819. 793	20	835.44 1.842	20	672.35 6.927	20	624.75 5.529	20	2.406.37 4.091	95,24 %	98,83 %
	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan	Jumlah laporan keuangan perangkat	18	103.154.435	3	10.800.0 00	4	22.090. 000	4	31.858. 000	7	36.899. 500	18	101.647. 500	100,0 0%	98,54 %

Laporan Kinerja 2023

		Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	daerah yang disusun tepat waktu															
					2.538.049.438	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)										95,43 %	98,82 %	
						Predikat Kinerja										Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	
	2,03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase laporan BMD pada perangkat daerah yang disusun tepat waktu dan dimanfaatkan	100	16.781.981	25	-	25	3.750.000	25	3.250.000	25	7.720.000	100	14.720.000	100,0 %	87,71 %	
	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah laporan penatausahaan barang milik daerah SKPD yang disusun tepat waktu	4	16.781.981	1	0,00	1	3.750.000	1	3.250.000	1	7.720.000	4	14.720.000	100,0 %	87,71 %	
					16.781.981	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)										100,0 %	87,71 %	
						Predikat Kinerja										Sangat Tinggi	Tinggi	
	2,04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Jumlah realisasi PAD perangkat daerah	2.500.000.000	10.623.710	4.610.660	-	31.197.102	3.850.000	248.570.000	3.392.000	371.813.382	3.370.000	656.191.144	10.612.000	26,25 %	99,89 %	
	07	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah laporan pengelolaan retribusi daerah	4	10.623.710	1	-	1	3.850.000	1	3.392.000	1	3.370.000	4	10.612.000	100,0 %	99,89 %	

			yang disusun tepat waktu															
					10.623.710	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)										100,00%	99,89%	
						Predikat Kinerja										Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	
	2,05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase rata-rata capaian kinerja administrasi kepegawaian perangkat daerah	100	69.085.956	34,78	9.790.000	26,09	16.695.000	26,09	11.870.000	34,78	29.439.700	122	67.794.700	121,74%	98,13%	
		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	jumlah pakaian dinas beserta atribut perlengkapannya yang diadakan	0	-	0	0	0	0					-	-	0,00%	0,00%	
	03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah laporan data administrasi kepegawaian yang di mutakhirkan	12,00	12.985.956	3	-	3	3.440.000	3	1.200.000	3	8.249.700	12	12.889.700	100,00%	99,26%	
	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah pegawai yang mengikuti bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	13,00	56.100.000	5	9.790.000	3	13.255.000	3	10.670.000	5	21.190.000	16	54.905.000	100,00%	97,87%	
				0,00		Rata-Rata Capaian Kinerja (%)										100,0	98,13	

Laporan Kinerja | 2023

					69.085.956											0%	%	
						Predikat Kinerja										Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	
	2,06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase rata-rata capaian kinerja administrasi umum perangkat daerah	100	438.017.950	55,65	82.670.900	23,43	52.949.200	24,48	101.421.912	31,17	197.648.293	130,96	437.690.305	130,96%	99,93%	
	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	15	5.832.250	3	-	3	-	2	2.153.000	7	3.678.000	15	5.831.000	100,00%	99,98%	
	02	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan kantor Yang diadakan	1	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	
	03	Penyediaan peralatan rumah tangga	Jumlah Peralatan rumah tangga Yang diadakan	1	3.000.000	-	-	-	-	1	3.000.000	-	-	1	3.000.000	100,00%	100,00%	
	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah bahan logistik kantor yang disediakan	2	7.710.700	2	1.512.000	2	314.000	2	1.596.000	2	4.264.000	2	7.686.000	100,00%	99,68%	
	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	4	13.675.000	4	2.250.000	4	1.200.000	4	6.750.000	4	3.474.000	4	13.674.000	100,00%	99,99%	

	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	60	6.720.000	15	-	15	2.900.000	15	1.280.000	15	2.540.000	60	6.720.000	100,00%	100,00%	
	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah tamu yang difasilitasi kunjungannya	120	6.000.000	30	2.500.000	30	-	15	1.000.000	45	2.500.000	120	6.000.000	100,00%	100,00%	
	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi SKPD yang diselenggarakan	500	395.080.000	212	76.408.900	58	48.535.200	78	88.642.912	76	181.192.293	424	394.779.305	84,80%	99,92%	
					438.017.950	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)										85,61%	99,93%	
						Predikat Kinerja										Tinggi	Sangat Tinggi	
	2,07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang diadakan	3	7.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.982.000	0,00%	99,74%	
	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan/ mesin lainnya yang diadakan	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	
	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau	1	7.000.000	-	-	-	-	1	6.982.000	-	1	-	6.982.000	100,00%	99,74%	

Laporan Kinerja 2023

		Kantor atau Bangunan Lainnya	bangunan lainnya yang diadakan															
					7.000.000	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)										100,00%	99,74%	
						Predikat Kinerja										Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	
	2,08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase rata-rata capaian kinerja penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100	152.889.438	25,00	26.810.941	25,00	35.508.194	25,00	36.672.545	25,00	38.539.100	100	137.530.780	100,00%	89,95%	
	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah pelayanan surat menyurat yang disediakan	900	22.879.570	260	2.000.000	190	5.600.000	156	5.800.000	198	9.021.730	804	22.421.730	89,33%	98,00%	
	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah rekening bulanan jasa komunikasi, SDA dan listrik yang terbayarkan	60	58.009.868	15	12.810.941	15	11.908.194	15	12.872.545	15	5.517.370	60	43.109.050	100,00%	74,31%	
	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah tenaga jasa pelayanan umum	4	72.000.000	4	12.000.000	4	18.000.000	4	18.000.000	4	24.000.000	4	72.000.000	100,00%	100,00%	
					152.889.438	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)										98,40%	89,95%	
						Predikat Kinerja										Sangat Tinggi	Tinggi	
	2,09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang	Jumlah barang milik daerah	57	79.912.800	10,00	7.220.000	17,00	19.773.000	23,00	19.700.600	25,00	29.270.270	51	75.963.870	89,04%	95,06%	

		Urusan Pemerintahan Daerah	penunjang urusan pemerintahan daerah yang dipelihara														
	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	9	45.650.000	5	5.600.000	6	6.015.000	7	9.220.600	9	22.400.270	7	43.235.870	75,00 %	94,71 %
	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	47	21.150.000	5	1.620.000	10	650000	16	10.480.000	12	6.870.000	43	19.620.000	91,49 %	92,77 %
	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor yang dipelihara	1,00	13.112.800	-	-	1	13.108.000	-	-		-	1	13.108.000	100,00 %	99,96 %
					79.912.800	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)										83,47 %	95,06 %
						Predikat Kinerja										Tinggi	Sangat Tinggi
	1.02.02	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Meningkatnya Jumlah Investor PMA dan PMDN yang berskala Nasional	33	406.846.885	9	10.650.000	7	144.848.251	9	60.864.000		180.554.699	25	396.916.950	76,03 %	97,56 %

Laporan Kinerja 2023

2,01	Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase PMA/PMD N yang terfasilitasi	100	235.311.845	25	10.650.000	25	136.898.251	25	60.864.000	25	26.716.299	100	235.128.550	100,00%	99,92%
01	Penetapan Kebijakan Daerah mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan kemudahan Penanaman Modal	Jumlah Perda PM yang terbit	2	189.303.030	-	0,00	-	122.941.400	-	48.814.000	2	17.492.400	2	189.247.800	100,00%	99,97%
02	Evaluasi pelaksanaan fasilitasi / insentif dan kemudahan penanaman modal	Jumlah laporan Evaluasi pelaksanaan pemberian fasilitas/insentif PM yang dihasilkan	2	46.008.815	1	10.650.000,00	1	13.956.851	-	12.050.000	-	9.223.899	2	45.880.750	100,00%	99,72%
	Pembuatan Peta Potensi investasi kabupaten/Kota	Persentase jenis potensi yang disusun dalam peta potensi Kabupaten	100	171.535.040	-	-	-	7.950.000	-	-	100	153.838.400	100	161.788.400	100,00%	94,32%
	Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen Peta Potensi dan peluang usaha di Kabupaten/	1	171.535.040	-	-	-	7.950.000	-	-	1	153.838.400	1	161.788.400	100,00%	94,32%

			Kota														
					406.846.885	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)										100,00%	97,56%
						Predikat Kinerja										Sangat Tinggi	Sangat Tinggi
	1.02.03	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Jumlah Realisasi PMA dan PMDN	3,3E+12	188.444.480	772.093.734.631	-	846.221.100.408	25.262.000	874.274.038.189	93.955.228	649.483.448.694	66.302.272	3.142.072.321.922	185.519.500	95,21%	98,45%
	2,01	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah MoU Penanaman Modal yang dihasilkan	5	188.444.480	2,00	-	2,00	25.262.000	1,00	93.955.228		66.302.272	5,00	185.519.500	100,00%	98,45%
	01	Penyusunan Strategi promosi penanaman modal	Jumlah Media Strategi Promosi Penanaman Modal yang dibuat	3	22.638.490	1,00	-	1	6.620.000	1	6.462.500		8.425.000	3,00	21.507.500	100,00%	95,00%
	02	Pelaksanaan kegiatan promosi penanaman modal daerah/kabupaten/kota	jumlah kegiatan pameran penanaman modal yang diikuti/dilaksanakan	2	165.805.990	1,00	-	1	18.642.000	-	87.492.728		57.877.272	2,00	164.012.000	100,00%	98,92%
					188.444.480	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)										100,00%	98,45%
						Predikat Kinerja										Sangat Tinggi	Sangat Tinggi
	1.02.04	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Persentase ketepatan waktu penyelesaian izin yang	72,00	307.191.107	15	38.744.400	20	116.905.680	22	58.903.700			57	303.816.180	79,17%	98,90%

Laporan Kinerja 2023

			diterbitkan sesuai SOP														
	2,01	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Persentas e Capaian Kinerja Pelayanan Perizinan dan Non perizinan secara terpadu	100,00	307.191.107	25	38.744.400	25	116.905.680	25	58.903.700	25	89.262.400	100	303.816.180	100,00%	98,90%
	01	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Izin yang diterbitkan	4100,00	286.870.777	1.116	38.744.400	912	110.057.600	1.617	57.213.700	1.829	78.592.400	5.474	284.608.100	133,51%	99,21%
			Jumlah Pemilik usaha (perempua n) yang diterbitkan izinnya	1250,00		333	-	486	-	688		1.123		2.630			
	02	Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan	Jumlah pengaduan yang ditindak lanjuti	5	20.320.330	1	-	1	6.848.080	2	1.690.000	2	10.670.000	6	19.208.080	120,00%	94,53%

		Terpadu Perizinan dan Non Perizinan																
					307.191.107	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)										126,75%	98,90%	
						Predikat Kinerja										Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	
	1.02.05	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Persentase Pelaku usaha yang taat terhadap peraturan yang terkait Penanaman Modal	75	417.091.801	15	18.197.000	15	140.026.400	10	60.180.000	35	172.706.606	75	391.110.006	100,00%	93,77%	
	2,01	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pelaku Usaha yang menyampaikan LKPM	95	417.091.801	20	18.197.000	20	140.026.400	10	60.180.000	45	172.706.606	95	391.110.006	100,00%	93,77%	
	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah kegiatan usaha yang difasilitasi penyelesaian permasalahan lainnya	8	102.921.550	2	1.870.000	2	15.960.000	2	41.694.000	2	33.230.000	8	92.754.000	100,00%	90,12%	
	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah pelaku usaha yang mengikuti BIMTEK	240	215.381.761	60	1.250.000	60	82.378.000	-	6.151.000	120	109.886.606	240	199.665.606	100,00%	92,70%	
	03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan	Jumlah Pelaku usaha yang diawasi	14	98.788.490	1	15.077.000	3	41.688.400	4	12.335.000	6	29.590.000	14	98.690.400	100,00%	99,90%	

Laporan Kinerja 2023

		Pelaksanaan Penanaman Modal																
					417.091.801	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)										100,00%	93,77%	
						Predikat Kinerja										Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	
	1.02.06	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	presentase data dan informasi penanaman modal yang dikelola	100	29.999.850		-						100	29.266.337	100,00%	97,55%		
	2,01	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pengelolaan data dan informasi Perizinan dan nonperizinan	100	29.999.850	-	-	50	2.950.337	-	22.230.000	50	4.086.000	100	29.266.337	100,00%	97,55%	
	01	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	jumlah data yang disediakan	2	29.999.850	-	-	1	2.950.337	-	22.230.000	1	4.086.000	2	29.266.337	100,00%	97,55%	
					29.999.850	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)										100,00%	97,55%	
						Predikat Kinerja										Sangat	Sangat	

							Tinggi	Tinggi		
				4.739.180.131,00	TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM			97,6 3%	97,9 6%	
					PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM			San gat Ting gi	San gat Ting gi	

Tindak Lanjut Hasil Rekomendasi Perbaikan-Perbaikan Tahun Lalu Tidak lanjut rekomendasi hasil evaluasi akuntabilitas Instansi Pemerintah (Lakip) pada tahun 2022 di tuangkan dalam matriks tindak lanjut sebagai berikut:

Matriks Tindak Lanjut Hasil Evaluasi LAKIP Dinas Penanaman Modal dan PTSP

Tahun 2022

No	Rekomendasi	Rencana Aksi Tidak Lanjut	Status/progres penyelesaian
1.	Pedoman Teknis Perencanaan Kinerja/SOP pengumpulan data kinerja diformalkan dan dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan	Melakukan perbaikan dan memformalkan Pedoman Teknis Perencanaan kinerja/SOP dan dijadikan sebagai acuan dalam penyusunan perencanaan.	Telah memformalkan dan menjadi dasar penyusunan perencanaan
2.	Dokumen Renstra, RKT perubahan, PK dan dokumen Rencana Aksi diformalkan	Akan melakukan perbaikan dan memformalkan Dokumen Renstra, RKT perubahan, PK dan dokumen Rencana Aksi.	Telah melakukan perbaikan dan memformalkan Dokumen Renstra, RKT perubahan, PK dan dokumen Rencana Aksi.
3.	Dilakukan sosialisasi dalam Unit Kerja terkait perjanjian kinerja dengan target yang ingin dicapai sehingga semua pegawai peduli, serta berkomitmen dalam mencapai kinerja yang telah direncanakan.	Akan melakukan sosialisasi dalam Unit Kerja terkait perjanjian kinerja dengan target yang ingin dicapai dalam mencapai kinerja yang telah direncanakan..	Telah melakukan sosialisasi PK untuk melaporkan dan Memonitoring capaian kinerja secara periodik.
4.	Pengukuran capaian kinerja per PK belum sebaiknya memanfaatkan teknologi informasi (aplikasi) agar hasilnya lebih akurat.	Telah memanfaatkan Capaian Kinerja dan monitoring rencana aksi sebagai dasar untuk memilih dan memilah ASN yang berkinerja dengan yang kurang (tidak) berkinerja sedangkan dalam pemberian penghargaan (reward)	Pemberian penghargaan (reward) hanya sebatas ucapan belum berbentuk tulis atau lainnya
5.	Pengukuran kinerja menjadi dasar dalam penyesuaian (pemberian/pengurangan) tunjangan kinerja/penghasilan, menjadi dasar dalam penempatan/penghapusan jabatan baik struktural maupun fungsional, dan mempengaruhi penyesuaian (Refocusing) Organisasi.	Akan melakukan Pengukuran kinerja secara berjenjang dengan peningkatan kualitas pengukuran kinerja berkala tidak terbatas pada realisasi keuangan dan fisik sebagai dasar pemberian reward and Punishment.	Telah melakukan peningkatan kualitas pada PK (pejabat struktural) dan SKP (kinerja individu).
6.	Hasil Pengukuran kinerja menjadi	Akan melakukan Pengukuran kinerja	Telah dilakukan Evaluasi

	dasar me-reviu kebijakan dalam pencapaian kinerja dan menjadi dasar me-reviu kebijakan dalam merumuskan penyesuaian anggaran (tambah/kurang)	atas Rencana Aksi untuk penegedalian dan pemantauan kinerja secara berkala	Internal setiap Triwulan
7.	Dokumen LAKIP menginfokan terkait efisiensi atas penggunaan sumber daya dan upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan.	Laporan Kinerja telah menyajikan informasi efesiensi sumberdaya terkait pencapaian sasaran.	Dapat di lihat Pada Halaman 69 - 72
8.	Informasi dalam laporan kinerja disosialisasikan dalam unit kerja sehingga menjadi kepedulian seluruh pegawai untuk meningkatkan kinerjanya.	Telah memanfaatkan Informasi yang disajikan dalam laporan kinerja untuk peningkatan kinerja	Telah dilakukan Evaluasi Internal setiap Triwulan
9.	Implementasi SAKIP belum memberikan kesan yang nyata (dampak) dalam efektifitas dan efisiensi dalam mencapai kinerja disebabkan hasil evaluasi dan dimanfaatkan untuk perbaikan dan peningkatan akuntabilitas kinerja.	Telah dilakukan pencantuman rekomendasi dalam rangka perbaikan kinerja kedepannya.	Telah dilakukan Evaluasi Internal setiap Triwulan
9.	Memanfaatkan hasil evaluasi program/rencana aksi dengan menindaklanjuti rekomendasi-rekomendasi evaluasi program/rencana aksi dan tindak lanjut tertuang dalam evaluasi-evaluasi program/rencana aksi triwulan berikutnya.	Telah memanfaatkan hasil evaluasi program/rencana aksi dengan menindaklanjuti rekomendasi-rekomendasi evaluasi program/rencana aksi dan tindak lanjut tertuang dalam evaluasi-evaluasi program/rencana aksi triwulan berikutnya	Telah dilakukan Evaluasi Internal setiap Triwulan

BAB IV

PENUTUP

Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Luwu Timur telah menetapkan 2 (dua) sasaran strategis dan 1 sasaran pendukung yang didasarkan pada tujuan, sasaran strategis dan target kinerja yang telah ditetapkan baik pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021-2026, serta Rencana Strategis (Renstra) DPMPTSP Tahun 2021-2026.

Secara umum hasil pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Luwu Timur dalam pencapaian sasaran pada tahun 2023, dapat disimpulkan sebagai berikut :

- a. Realisasi Anggaran belanja APBD Tahun 2022 adalah sebesar Rp. 4.442.538.832,- (93,40%), yang terdiri dari Belanja Pegawai Rp. 2.358.233.969,- (95,81%) dan Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp. 1.952.678.317,- (90,31%) dan Belanja Modal Rp 131.626.546,- (98,97%).
- b. Persentase Capaian Kinerja sasaran strategis 1 yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Luwu Timur Tahun 2023 sebesar **114,98%** dengan **Predikat Baik**, dan sasaran strategis 2 sebesar **125,72 %**.
- c. Persentase Capaian Kinerja sasaran pendukung yaitu Persentase Capaian Kinerja Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Luwu Timur Tahun 2023 sebesar **103,02%** dengan **Predikat Baik**.
- d. Rekomendasi yang telah ditindaklanjuti yaitu :
 - Pedoman Teknis Perencanaan Kinerja/SOP pengumpulan data kinerja telah diformalkan dan dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan.
 - Hasil pengukuran kinerja belum dapat dijadikan dasar pemberian penghargaan (reward) karena belum ada payung hukum yang dapat dijadikan sebagai dasar dalam pemberian reward dan punishment.
 - Telah dilakukan pencantuman rekomendasi dalam rangka perbaikan kinerja kedepannya.
 - Melakukan sosialisasi dalam Unit Kerja terkait perjanjian kinerja dengan target yang ingin dicapai dalam mencapai kinerja yang telah direncanakan.
 - Laporan Kinerja telah menyajikan informasi efesiensi sumberdaya terkait pencapaian sasaran.

- e. Faktor yang menjadi penghambat pencapaian kinerja Tahun 2023 terhadap beberapa target sasaran Dinas Penanaman modal dan PTSP Kab. Luwu Timur yaitu :
- Penyesuaian penggunaan Aplikasi SIMDAnG pada Penatausahaan Keuangan yang mempengaruhi penyerapan anggaran
 - Terdapat harga barang di E-Catalog yang lebih tinggi dari Harga di DPA-SKPD
 - Terdapat beberapa jabatan Struktural, fungsional penyetaraan dan jabatan pelaksana yang masih kosong, mempengaruhi realisasi belanja gaji dan tunjangan
 - Terdapat beberapa kegiatan yang sifatnya disediakan sehingga penggunaan anggarannya disesuaikan dengan kondisi dan Kebutuhan
 - Keterlambatan proses pengadaan barang dan jasa
 - Pelaksanakan kegiatan yang tidak sesuai dengan KAK dan anggaran kas yang telah disusun
 - Pengolahan data dan informasi pada lingkup bidang yang belum maksimal
- f. Adapun rekomendasi terkait peningkatan kinerja di masa mendatang yang perlu ditindaklanjuti oleh Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Luwu Timur adalah sebagai berikut :
- Meningkatkan monitoring dan evaluasi terhadap perjanjian kinerja secara berjenjang di tingkat SKPD
 - Pelaksanaan kegiatan sesuai dengan jadwal yang tertuang dalam KAK dan mengacu kepada anggaran kas yang telah ditetapkan.
 - Memaksimalkan pengolahan data dan informasi lingkup OPD
 - Mencermati program/kegiatan yang sifatnya disediakan untuk mengantisipasi SILPA diakhir tahun
 - Meningkatkan koordinasi lintas sektoral terkait peningkatan realisasi investasi dan pelayanan perizinan usaha.

Akhirnya dengan disusunnya Laporan Kinerja Tahun Anggaran 2023 diharapkan dapat memberikan informasi secara transparan kepada seluruh pihak terkait pelaksanaan tugas fungsi DPMPTSP Kabupaten Luwu Timur, sehingga dapat memberikan umpan balik guna peningkatan kinerja organisasi terhadap perkembangan tuntutan stakeholders, sehingga kontribusi DPMPTSP dalam pembangunan dapat lebih dirasakan manfaatnya.

Malili, 28 Februari 2024

KEPALA DINAS,



ANDI HABIL UNRU, SE

NIP. 19641231 198703 1 208

Pangkat : Pembina Utama Muda

L

A

M

P

I

R

A

N